

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 900/1857-Kpts/Sekret/2017

Lampiran : 1 (satu) dokumen

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor tentang Penetapan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Renja BPKAD Kabupaten Bogor.

Mengingat.....

---

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan.....

---

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan.....

---

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
  27. Peraturan.....
-

27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018;
29. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/382/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Nomor 900/119-Kpts/Sekret/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : Juli 2017

**KEPALA,**



**H. DIDI KURNIA, SH., M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 196010111985031001**

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2013-2018**



**Juni 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018. Renstra BPKAD juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Perubahan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Semoga apa yang telah dicanangkan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Cibinong, Juli 2017

Kepala BPKAD Kabupaten Bogor,



**H. DIDI KURNIA, SH., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
<b>BAB II           GAMBARAN PELAYANAN BPKAD</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD	II-1
2.2 Sumber Daya BPKAD	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	II-22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada BPKAD	II-41
<b>BAB III          ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-1
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
<b>BAB IV          TUJUAN DAN SASARAN</b>	IV-1
<b>BAB V           RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	V-1
<b>BAB VI          INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	VI-1
<b>BAB VII         PENUTUP</b>	VII-1

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai BPKAD per 30 Juni 2017
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana per 30 Juni 2017
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan per 30 Juni 2017
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan per 30 Juni 2017
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per 30 Juni 2017
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Perjenjangan s.d 30 Juni 2017
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah DPKBD Tahun 2013-2016 (Audited)
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPKBD Tahun 2013-2016 (Audited)
Tabel 2.9	Sarana Kerja yang Terdapat di BPKAD per 30 Juni 2017
Tabel 2.10	Perkembangan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016 (dalam ribu rupiah)
Tabel 2.11	Pengamanan Aset Sepanjang Tahun 2014-2016
Tabel 2.12	Review Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
Tabel 3.1	Pemetaan Analisa SWOT BPKAD
Tabel 4.1.a	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun 2014-2016
Tabel 4.1.b	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun 2017-2018
Tabel 5.1.a	Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016

---

Tabel 5.1.b Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2017-2018

Tabel 6.1.a Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2014-2016 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 6.1.b Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2017-2018 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

---

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Gambar 2.2 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)
- Gambar 2.3 Perkembangan Komposisi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016
- Gambar 2.4 Perkembangan Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016
- Gambar 2.5 Komposisi Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016
- Gambar 2.6 Komposisi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Terhadap Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014-2016
- Gambar 2.7 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)
- Gambar 2.8 Perkembangan Nilai Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016
- Gambar 2.9 Perkembangan Jumlah Aset Tetap berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang Telah Bersertifikat Tahun 2013-2016 (dalam satuan bidang tanah)
-

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 berubah nama menjadi Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. PD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap PD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra PD akan menjadi pedoman PD saat menyusun Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

---

Sedangkan menurut Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selain itu dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, kebijakan nasional dan pemekaran daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan di daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap SOTK dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor baik secara struktur, nomenklatur maupun tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing SOTK.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penyelarasan dalam bentuk penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna sinkronisasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan tetap mempedomani Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta

---

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2016 berlaku efektif selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2017 dan 2018, namun proses perjalanan, berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah muncul berbagai kekinian, yang mendorong Pemda Kabupaten Bogor juga mengikuti sesuai perkembangan dan tantangan perekonomian secara umum, dengan melakukan perubahan terhadap Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 salah satunya yaitu dengan mempertimbangkan pasal 75 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Menurut pasal 84 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan rencana lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang memuat

---

rencana pencapaian indikator-indikator penciri termaju Kabupaten Bogor, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Barat, serta muatan lokal lainnya. Khusus untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, maka indikator termaju yang harus dicapai adalah mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Selanjutnya Perubahan Renstra BPKAD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2017 dan Renja BPKAD Tahun 2018.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
-

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
-

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
  34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
-

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025;
  38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah;
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036;
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
  44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
  46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
  47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017;
-

48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018;
50. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/564/Kpts/Per-UU/2016 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKAD Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPKAD Kabupaten Bogor.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang,** bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra BPKAD, fungsi Renstra BPKAD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra BPKAD, keterkaitan Renstra BPKAD dengan RPJMD Kabupaten Bogor, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Renja BPKAD, penciri termaju

---

Kabupaten Bogor dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

- 1.2 Landasan Hukum,** bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan,** bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD. Maksud penyusunan Renstra merupakan tujuan yang bersifat global, sedangkan tujuan merupakan rincian pencapaian maksud, yang biasanya diuraikan dalam bentuk poin per poin.
- 1.4 Sistematika Penulisan,** bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen (isi bab mulai bab pendahuluan hingga bab penutup).

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPKAD,** pada bab ini menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala BPKAD.
  - 2.2 Sumber Daya BPKAD,** bagian ini menjelaskan secara ringkas mengenai jenis sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan anggaran yang digunakan.
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target Renstra BPKAD periode sebelumnya dan indikator kinerja pelayanan BPKAD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD,** bagian ini mengemukakan hasil analisis Renstra Provinsi, hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
-

(RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan BPKAD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam layanan, dan arah lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD,** pada bab ini dikemukakan permasalahan pelayanan BPKAD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,** pada sub bab ini dikemukakan mengenai tugas dan fungsi BPKAD terkait dengan visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKAD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra,** pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BPKAD.
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,** pada sub bab ini dikemukakan mengenai apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis,** sub bab ini mereview kembali faktor dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD.
-

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang tertuang dalam RPJMD yang dijabarkan secara lebih operasional dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas PD, program lintas PD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPKAD untuk periode tahun 2013-2018.

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan antara lain bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018; dan Renstra PD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2017 dan Renja PD tahun 2018.

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BPKAD**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari:

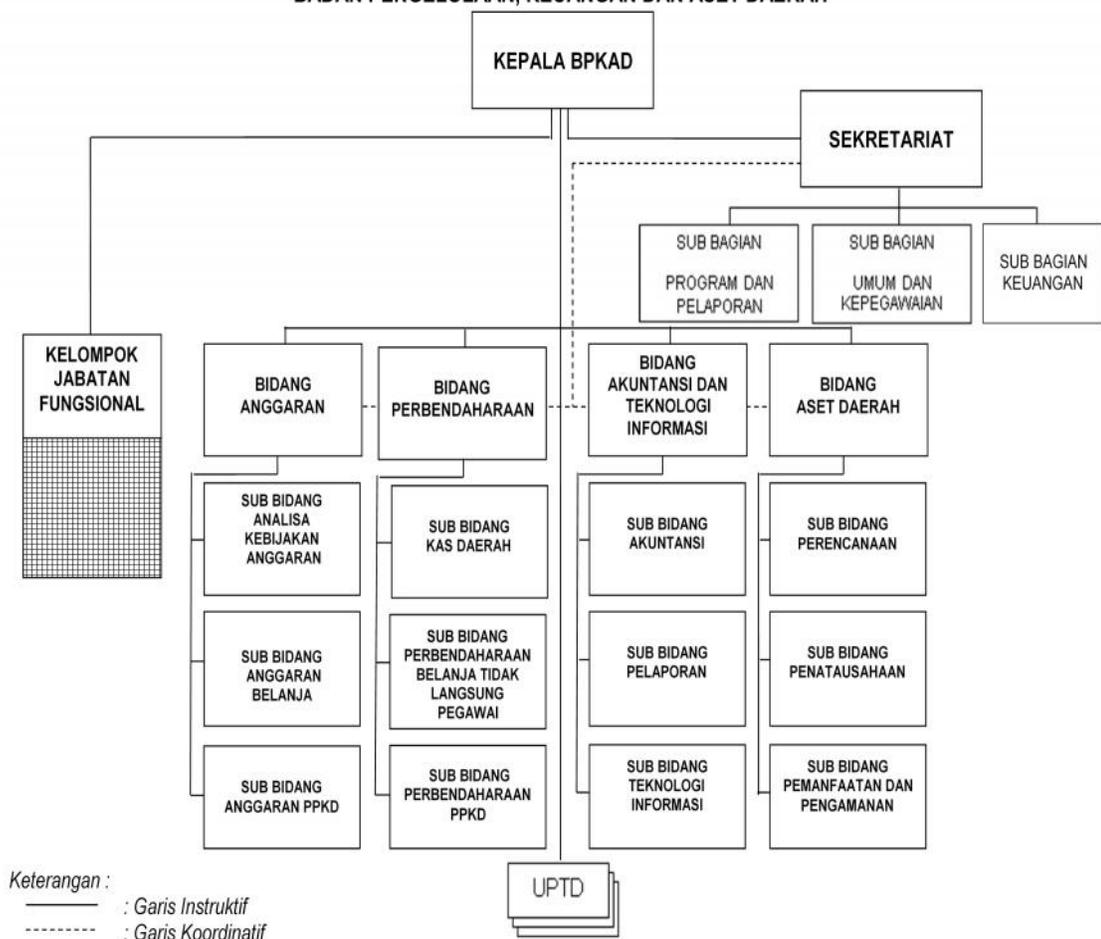
1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - c. Sub Bagian Keuangan.
  3. Bidang Anggaran, membawahkan :
    - a. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
-

- b. Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
  - c. Sub Bidang Anggaran PPKD.
4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Kas Daerah;
  - b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai;  
dan
  - c. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD.
5. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Akuntansi;
  - b. Sub Bidang Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Teknologi Informasi.
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perencanaan;
  - b. Sub Bidang Penatausahaan; dan
  - c. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disajikan dalam Gambar 2.1 berikut :

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Gambar 2.1 Bagan dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

**1. SEKRETARIAT**

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- d. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. Pengelolaan keuangan Badan;
- f. Pengelolaan situs web Badan; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh :

- i. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- iii. Sub Bagian Keuangan.

#### **SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. Pengelolaan penyusunan anggaran Badan;
- d. Pengelolaan situs web Badan dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
  - b. Pengelolaan barang/jasa Badan;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
  - d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
  - e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
-

## **SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan keuangan Badan;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2. BIDANG ANGGARAN**

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Anggaran; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- i. Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran;
  - ii. Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
  - iii. Sub Bidang Anggaran Belanja.
-

## SUB BIDANG ANALISA KEBIJAKAN ANGGARAN

Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan analisa kebijakan rancangan anggaran PPKD;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan daerah;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis analisa investasi Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## SUB BIDANG ANGGARAN PPKD

Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran PPKD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan PPKD, belanja PPKD dan pembiayaan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PPKD;
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran PPKD; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA

Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan

---

anggaran belanja daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan analisa rancangan anggaran belanja daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah;
- c. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Anggaran Belanja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PERBENDAHARAAN**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kas daerah;
- b. Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai;
- c. Pengelolaan anggaran PPKD;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Kas Daerah;
- ii. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai; dan
- iii. Sub Bidang Perbendaharaan PPKD.

#### **SUB BIDANG KAS DAERAH**

Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan kas

---

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- c. Pelaksanaan penyimpanan uang;
- d. Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan utang daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kas Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PEGAWAI

Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan;
- b. Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan;
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### SUB BIDANG PERBENDAHARAAN PPKD

Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan

---

anggaran PPKD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perbendaharaan PPKD mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran PPKD;
- b. Pelaksanaan penatausahaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga;
- c. Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perbendaharaan PPKD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **4. BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan
- c. Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Akuntansi;
  - ii. Sub Bidang Pelaporan; dan
  - iii. Sub Bidang Teknologi Informasi.
-

## SUB BIDANG AKUNTANSI

Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Akuntansi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## SUB BIDANG PELAPORAN

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan Daerah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester pertama dan prognosis Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## SUB BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam

---

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah;
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **5. BIDANG ASET DAERAH**

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
- c. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- i. Sub Bidang Perencanaan;
- ii. Sub Bidang Penatausahaan; dan
- iii. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan.

### **SUB BIDANG PERENCANAAN**

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan analisis perencanaan

---

barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga barang;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **SUB BIDANG PENATAUSAHAAN**

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan administrasi barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan barang milik daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN**

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan mempunyai fungsi :

---

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan barang milik daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan barang milik daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Namun pada BPKAD tidak dibentuk UPT karena BPKAD memiliki tugas pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah.

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Nama dan jumlah jabatan fungsional akan ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Sama halnya dengan UPT, pada BPKAD tidak dibentuk kelompok Jabatan Fungsional.

---

## 2.2 SUMBER DAYA BPKAD

### 1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan pada BPKAD Kabupaten Bogor sebanyak 89 orang yang terdiri dari PNS dan tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 **Jumlah Pegawai BPKAD per 30 Juni 2017**

No	PEGAWAI	JUMLAH (orang)	%
1.	PNS	87	97,75
2.	KONTRAK/HONORER	2	2,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>89</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 97,75% pegawai BPKAD adalah PNS, dan 2,25% adalah Tenaga Kontrak/Honorer yang belum diangkat menjadi pegawai tetap.

#### a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dari 87 orang PNS maka pengisian formasi jabatan struktural di BPKAD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang (24,14%) dan sisanya sebanyak 66 orang (75,86%) adalah pelaksana. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 **Jumlah Pegawai BPKAD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana per 30 Juni 2017**

No	JABATAN/STAF	JUMLAH (orang)	%
1	Eselon II	1	1,15
2	Eselon III	5	5,75
3	Eselon IV	15	17,24
4	Fungsional	-	-
5	Pelaksana	66	75,86
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>

**b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat**

Dari 87 jumlah pegawai yang berstatus PNS di BPKAD terdapat 8,05% pegawai berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 75,86%, dan yang berstatus golongan II sebanyak 16,09%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan per 30 Juni 2017**

No	GOLONGAN	JUMLAH (orang)	%
1	IV	7	8,05
2	III	66	75,86
3	II	14	16,09
4	I	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>

Adapun komposisi Tenaga Honorer adalah sebagai berikut :

- a. S-1 : 1 orang
- b. D-3 : 1 orang

**c. Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPKAD Kabupaten Bogor tahun 2017 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah yaitu SLTP/Sederajat dengan komposisi 1,15% dan tingkat pendidikan tertinggi yaitu Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi sebesar 31,03%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase terbesar yaitu 50,57%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-3 komposisinya sebesar 2,30%, pegawai dengan tingkat pendidikan D-2 sebesar 1,15% dan pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 13,79%, Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Pendidikan per 30 Juni 2017**

<b>No</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (orang )</b>	<b>%</b>
1.	Pasca Sarjana (S-2)	27	31,03
2.	Sarjana (S-1)	44	50,57
3.	Diploma (D-3)	2	2,30
4.	Diploma (D-2)	1	1,15
5.	SLTA/Sederajat	12	13,79
6.	SLTP/Sederajat	1	1,15
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel 2.4, dengan komposisi pegawai mayoritas berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana masing-masing sebesar 50,57% dan 31,03% diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja BPKAD Kabupaten Bogor sehingga output yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik dan mampu mempertahankan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” sesuai dengan penciri ke-21 untuk mencapai Kabupaten Termaju di Indonesia yang merupakan Visi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

**d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu**

Apabila dilihat dari jenis keesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 27,58% pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana dengan 4 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 48,29% terdiri dari 9 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 **Jumlah Pegawai BPKAD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu per 30 Juni 2017**

No	KESERJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)	%
A	PASCASARJANA (S-2)		
	1. Magister Manajemen (MM)	10	11,49
	2. Magister Ekonomi (ME)	1	1,15
	3. Magister Hukum (MH)	1	1,15
	4. Magister Sains (MSi)	12	13,79
B	SARJANA (S-1)		
	1. Sarjana Pemerintahan (SP)	2	2,30
	2. Akuntansi (SE.Ak/Ak.)	3	3,45
	3. Ekonomi Manajemen (SE)	21	24,14
	4. Agama (S.Ag)	1	1,15
	5. Teknik (ST)	3	3,45
	6. Sarjana Sains (S.Si)	1	1,15
	7. Ilmu Sosial (S.Sos)	5	5,75
	8. Komputer (S.Kom)	3	3,45
	9. Hukum (SH)	4	4,60
C	DIPLOMA (D-3)	2	2,29
D	SLTA/SEDERAJAT	18	20,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, pegawai BPKAD secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai BPKAD yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor, dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

**e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan**

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai di lingkungan BPKAD juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 87 pegawai BPKAD terdapat 1,15% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM I atau sejenisnya,

1,15% yang mengikuti penjenjangan Diklat PIM II atau sejenisnya, 4,60% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III, 17,24% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM IV atau sejenisnya, dan sisanya yakni 75,86% belum mengikuti Diklat Perjenjangan seperti yang disajikan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Jumlah Pegawai BPKAD yang Mengikuti Penjenjangan s.d 30 Juni 2017**

<b>No</b>	<b>DIKLAT PENJENJANGAN</b>	<b>JUMLAH (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Diklat PIM I	1	1,15
2.	Diklat PIM II	1	1,15
3.	Spama/Diklat PIM III	3	3,45
4.	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	14	16,09
5.	Belum Mengikuti Diklat Perjenjangan	68	78,16
	<b>Jumlah</b>	<b>87</b>	<b>100,00</b>

## **2. Kondisi Umum Anggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD Kabupaten Bogor setiap tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing PD. Anggaran belanja yang dievaluasi dalam penjelasan Renstra BPKAD Tahun 2013-2018 adalah anggaran belanja daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2013-2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

DPKBD selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran DPKBD selaku SKPD dan PPKD. Komposisi anggaran PPKD diperuntukan untuk Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja DPKBD selaku SKPD terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Perkembangan anggaran belanja DPKBD secara keseluruhan tahun 2013-2016, yaitu anggaran belanja tahun 2014 turun sebesar Rp 6.154.154.000,- atau sebesar 1,00% dibandingkan anggaran tahun 2013 sebesar Rp 616.909.130.000,-. Anggaran belanja tahun 2015 naik sebesar Rp 195.211.070.000,- atau sebesar 31,96% dibandingkan anggaran tahun 2014 sebesar Rp 610.754.976.000,-. Sedangkan anggaran belanja tahun 2016 naik sebesar Rp 317.910.976.000,- atau sebesar 39,44% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp 805.966.046.000,-. Anggaran belanja tidak langsung non pegawai yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun karena disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan realisasi belanja daerah DPKBD secara keseluruhan tahun 2013-2016 terjadi peningkatan persentase realisasi, hal ini berarti bahwa proses perencanaan semakin baik sehingga sisa anggaran tidak terlalu besar. Namun demikian pada tahun 2014 realisasi penyerapan anggaran paling kecil, hal ini disebabkan:

1. Pencairan belanja hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
-

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa belanja hibah dan bantuan sosial diberikan kepada organisasi yang telah berbadan hukum;

2. Bagi hasil kepada Kota Depok, usulan pencairannya tidak sebesar yang dianggarkan (hanya mencairkan bagi hasil tahun 2013);
3. Bantuan Keuangan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak dicairkan.

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah DPKBD Tahun 2013–2016 (Audited)**

<b>TAHUN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
2013	616.909.130.000	525.981.889.037	85,26
2014	610.754.976,000	483.292.297.086	79,13
2015	805.966.046,000	725.869.411.064	90,06
2016	1.123.877.022,000	1.090.058.494.856	96,99

Anggaran belanja langsung tahun 2014 naik sebesar Rp 6.451.665.000,- atau 23,59% dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp 27.349.190.000,-. Sedangkan anggaran belanja langsung tahun 2015 naik sebesar Rp 5.756.182.000,- atau 17,03% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp 33.800.855.000,-, dan anggaran belanja langsung tahun 2016 naik sebesar Rp 5.670.167.000,- atau 14,33% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp 39.557.037.000,-. Jika dilihat dari kinerja keuangan DPKBD dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kenaikan serapan anggaran selama kurun waktu 2014-2016, hal ini dilihat dari realisasi keuangan belanja langsung terhadap anggarannya yaitu tahun 2013 sebesar 92,82%, tahun 2014 sebesar 89,99%, tahun 2015 mencapai 88,39% dan tahun 2016 sebesar 93,64%. Program dan kegiatan DPKBD selama periode 2014-2016 telah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan dengan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan yaitu 97,02% pada tahun 2014, 99,32% untuk tahun 2015 dan 99,74 di tahun 2016 walaupun pada tahun 2015 terdapat

satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah karena Juklak Penatausahaan Keuangan yang akan disampaikan kepada SKPD belum final pembahasannya. Selain adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 yang menyebabkan ada sisa anggaran, namun ada beberapa sumber yang menyebabkan anggaran tidak terserap, yaitu efisiensi pada belanja pegawai, belanja jasa tenaga kerja, belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas dalam dan luar daerah, belanja bahan logistic kantor dan sebagainya.

Tabel 2.8 **Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPKBD Tahun 2013–2016 (Audited)**

<b>TAHUN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>%</b>
2013	27.349.190.000	25.386.834.844	92,82
2014	33,800,855,000	30,418,765,772	89,99
2015	39,557,037,000	34,965,345,574	88,39
2016	45,227,204,000	42,350,197,613	93,64

### 3. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Bogor terlihat dalam tabel 2.9 di bawah ini :

Tabel 2.9 **Sarana Kerja yang Terdapat di BPKAD per 30 Juni 2017**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Banyaknya</b>	<b>Satuan</b>
1	Tanah	± 3.966,80	m <sup>2</sup>
2	Gedung		
	Gedung Kantor I	1.620	m <sup>2</sup>
	Gedung Kantor II	700,4	m <sup>2</sup>
	Gedung Kantor III	820	m <sup>2</sup>
	Gedung Gudang	872	m <sup>2</sup>
3	Mushola	50	m <sup>2</sup>
4	Rumah Genset I	8	m <sup>2</sup>
5	Rumah Genset II	10	m <sup>2</sup>
6	Lahan Tempat Parkir	2	Tempat
7	Pos Keamanan I (BPKAD)	20	m <sup>2</sup>
8	Pos Keamanan II (BPKAD)	2,25	m <sup>2</sup>
9	Pos Keamanan III (Gudang)	6	m <sup>2</sup>
10	Halaman Kantor	881,62	m <sup>2</sup>

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Banyaknya</b>	<b>Satuan</b>
11	Listrik	2	Jaringan
12	PAM Air	1	Jaringan
13	Ruang Rapat	3	Ruang
14	Kendaraan Roda 6	1	Unit
15	Kendaraan Roda 4	28	Unit
16	Kendaraan Roda 2	36	Unit
17	AC	65	Unit
18	Komputer PC	119	Unit
19	Komputer Notebook	40	Unit
20	Printer	70	Unit
21	Meja Kerja Kayu	82	Unit
22	Meja Rapat	112	Unit
23	Kubikal	35	Set
24	Kursi Kerja	165	Unit
25	Kursi Rapat	126	Unit
26	Filling Cabinet	35	Unit
27	Rak Arsip	338	Unit
28	Proyektor	12	Unit
29	Jaringan Internet	5	Line
30	Area Taman Luar	1	Area
31	Lemari Arsip/ Besi	32	Unit
32	Faximail	2	Unit
33	Lemari Kaca Sorok	12	Unit
34	Lemari Custom	29	Unit
35	Sound System	5	Unit
36	Sofa	20	Unit
37	Papan Bagan Struktur	1	Unit
38	Papan Tulis Elektrik	1	Unit
39	Pesawat Telepon	18	Unit
40	Rak Kayu	11	Unit
41	Stabilisator/UPS	20	Unit
42	Televisi	16	Unit
43	Whiteboard	3	Unit
44	Wireless	3	Unit
45	Camera	2	Unit
46	Mesin Tik	2	Unit
47	Microphone	10	Unit
48	Handycam	2	Unit
49	Handkey	6	Unit
50	CCTV	25	Unit
51	Penghancur Kertas	8	Unit
52	Tabung Pemadam Kebakaran	32	Unit
53	GPS	5	Unit

### **2.3 KINERJA PELAYANAN BPKAD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga BPKAD memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat

kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mengemban tugas dalam pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, BPKAD juga berperan dalam pengkoordinasian pengelolaan barang daerah yang pelaksanaannya dibatasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. BPKAD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab :

1. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  2. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  3. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
  4. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
-

5. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
6. Membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
9. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
10. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah.

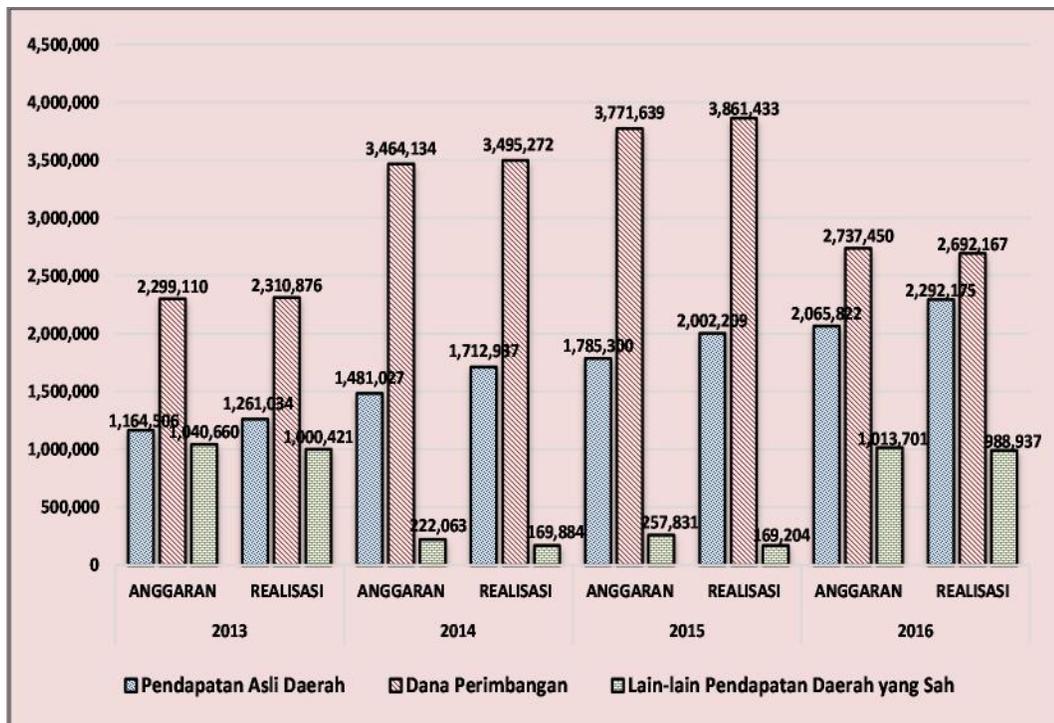
BPKAD selain mengelola anggaran selaku SKPD juga memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran dalam bentuk penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah serta disetujui bersama dengan DPRD, dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Bogor periode 2014-2016 menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, seperti disajikan pada tabel berikut :

---

Tabel 2.10 **Perkembangan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016 (dalam ribu rupiah)**

URAIAN	2013		2014		2015		2016	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4,504,277,319</b>	<b>4,572,332,367</b>	<b>5,167,225,988</b>	<b>5,378,094,140</b>	<b>5,814,770,953</b>	<b>6,032,847,734</b>	<b>5,816,974,746</b>	<b>5,973,280,685</b>
Pendapatan Asli Daerah	1,164,506,393	1,261,034,564	1,481,027,789	1,712,937,376	1,785,300,132	2,002,209,819	2,065,822,879	2,292,175,674
Dana Perimbangan	2,299,110,842	2,310,876,712	3,464,134,525	3,495,272,539	3,771,639,786	3,861,433,017	2,737,450,197	2,692,167,023
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,040,660,084	1,000,421,091	222,063,674	169,884,225	257,831,035	169,204,898	1,013,701,670	988,937,988
<b>BELANJA</b>	<b>5,192,700,712</b>	<b>4,614,270,730</b>	<b>5,782,479,790</b>	<b>4,899,883,275</b>	<b>6,770,520,774</b>	<b>5,638,217,125</b>	<b>7,002,273,099</b>	<b>6,465,300,553</b>
Belanja Tidak Langsung	2,246,094,109	2,071,735,671	2,511,076,341	2,236,881,395	2,889,060,956	2,556,311,719	3,162,472,610	3,083,375,228
Belanja Langsung	2,946,606,603	2,542,535,059	3,271,403,449	2,663,001,880	3,881,459,818	3,081,905,406	3,839,800,489	3,381,925,325
<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(688,423,393)</b>	<b>(41,938,363)</b>	<b>(615,253,802)</b>	<b>478,210,865</b>	<b>(955,749,821)</b>	<b>394,630,609</b>	<b>(1,185,298,353)</b>	<b>(492,019,868)</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>688,423,393</b>	<b>694,793,492</b>	<b>615,253,802</b>	<b>623,582,957</b>	<b>955,749,821</b>	<b>955,749,821</b>	<b>1,185,298,353</b>	<b>1,184,835,661</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	751,723,393	751,793,492	672,189,802	673,082,957	1,101,793,821	1,101,793,821	1,350,398,353	1,349,935,661
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	63,300,000	57,000,000	56,936,000	49,500,000	146,044,000	146,044,000	165,100,000	165,100,000

Rata-rata anggaran Pendapatan Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 437.565.809,- atau sebesar 9,10%, dengan persentase peningkatan tertinggi terdapat pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 133,68%, sedangkan posisi terendah ada pada komponen Pendapatan Perimbangan sebesar 10,48%. Berdasarkan komposisi pendapatan pada APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016 maka komposisi Pendapatan Asli Daerah dalam Total Pendapatan Daerah mengalami kecenderungan naik dan berbanding terbalik dengan komposisi Dana Perimbangan yang cenderung menurun, sedangkan komposisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Bogor.

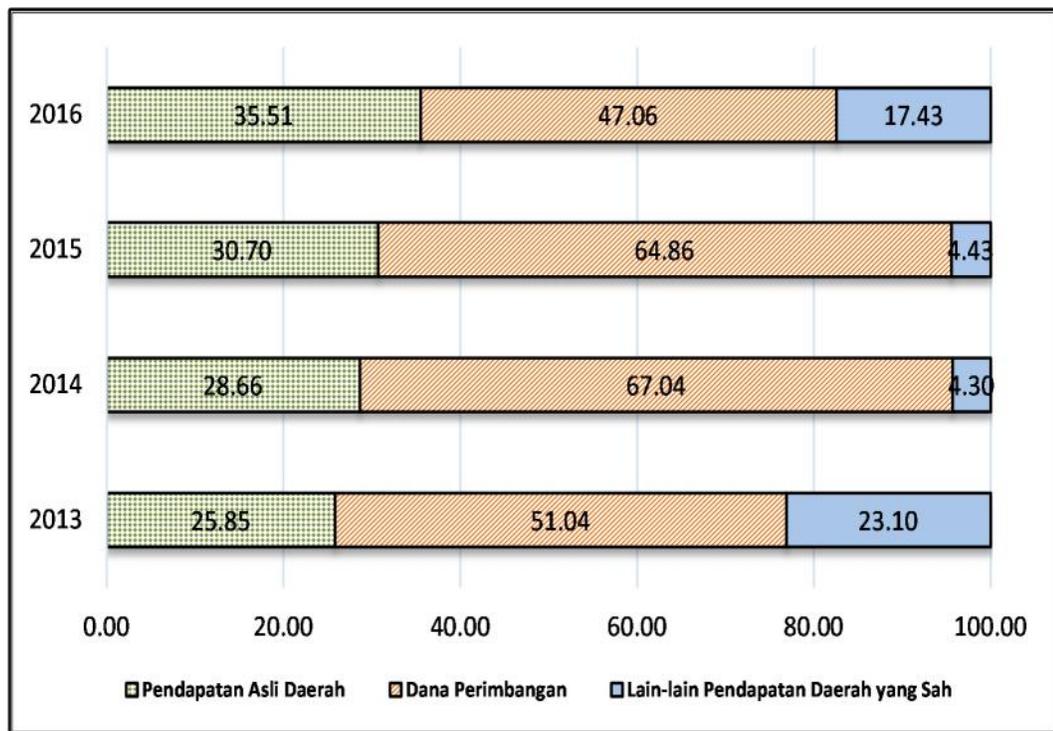


Catatan : Realisasi Audited

Gambar 2.2 **Perkembangan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016 (Dalam Ribuan Rupiah)**

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun komposisi terbesar penyumbang pendapatan Kabupaten Bogor masih berasal dari Dana Perimbangan. Namun demikian, pencapaian PAD yang memberikan kontribusi lebih dari 20,00% terhadap total pendapatan daerah

merupakan angka diatas rata-rata komposisi PAD terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota pada umumnya yang hanya berkisar 7,00% - 10,00% (Kementerian Dalam Negeri, 2012). Gambaran perkembangan komposisi target pendapatan daerah kurun waktu 2013-2016, sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut :



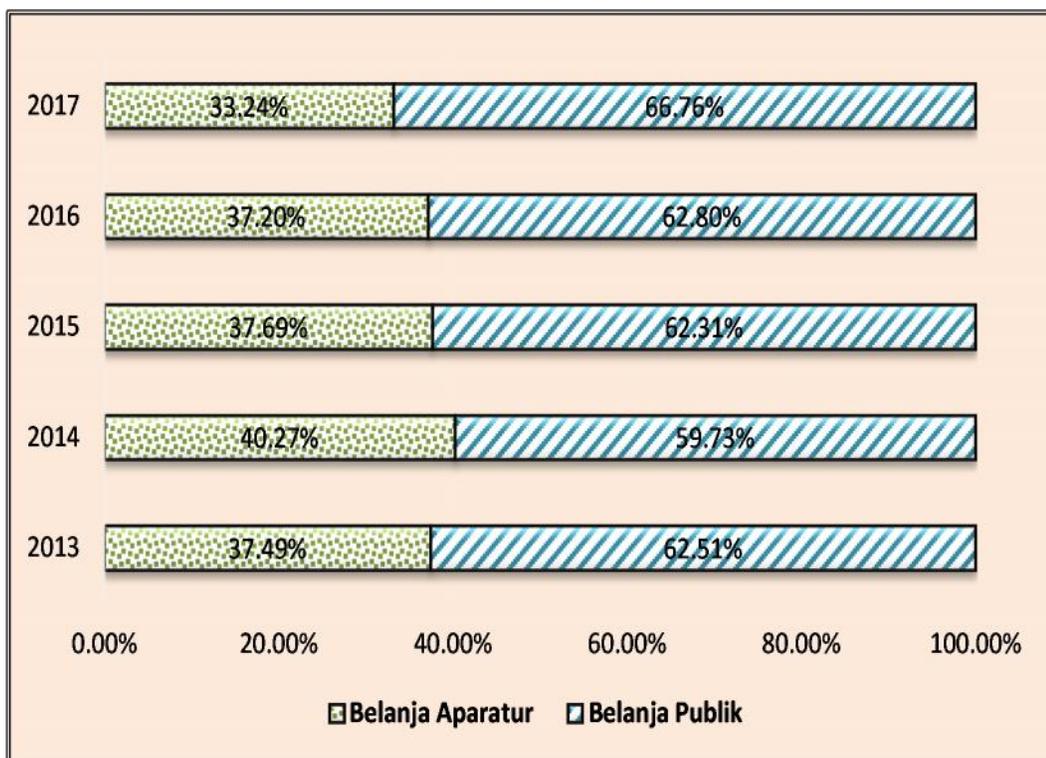
Gambar 2.3 **Perkembangan Komposisi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016**

Sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka BPKAD melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, terutama melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan pengelolaan APBD yang efektif.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, pengelolaan APBD selain berkenaan dengan pengelolaan pendapatan daerah, yakni bagaimana pola pendistribusian pendapatan daerah melalui pengelolaan belanja daerah yang diarahkan untuk pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pengelolaan belanja daerah selalu mengarahkan belanja daerah untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, dengan

prioritas utama untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor, serta pencapaian 25 Penciri Kabupaten Bogor Termaju.

Alokasi belanja daerah terutama untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam penggunaannya tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang mampu memberikan dukungan kepada program-program strategis daerah. Upaya tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu dua tahun terakhir, bahwa belanja daerah dalam APBD proporsinya paling besar digunakan untuk belanja publik dimana pada tahun 2017 komposisinya mencapai 66,76% dan sisanya untuk membiayai belanja aparatur. Perkembangan proporsi alokasi belanja publik dan belanja aparatur dalam APBD Kabupaten Bogor kurun waktu 2013-2016, digambarkan sebagai berikut :



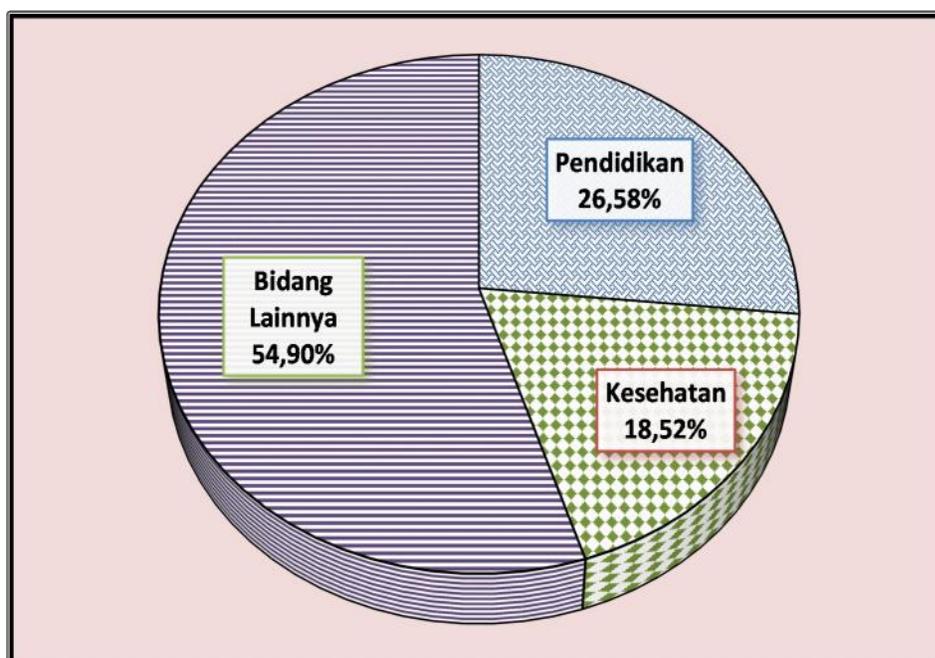
Gambar 2.4 **Perkembangan Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016**

Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen terhadap peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik yang terlihat dalam empat tahun terakhir, persentase anggaran belanja aparatur dari tahun ke tahun menurun dan sebaliknya anggaran belanja publik persentasenya meningkat. Selain itu,

selama empat tahun terakhir anggaran belanja secara umum diarahkan pula untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas di Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat Pembagian Urusan, dimana Pemerintah Daerah melaksanakan urutan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Pembagian urusan pemerintahan bertujuan agar pembangunan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien sehingga pembangunan di Kabupaten Bogor senantiasa berpihak kepada masyarakat. Urusan Pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar cukup mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk alokasi belanja bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor, secara umum tergambar dalam grafik sebagai berikut :

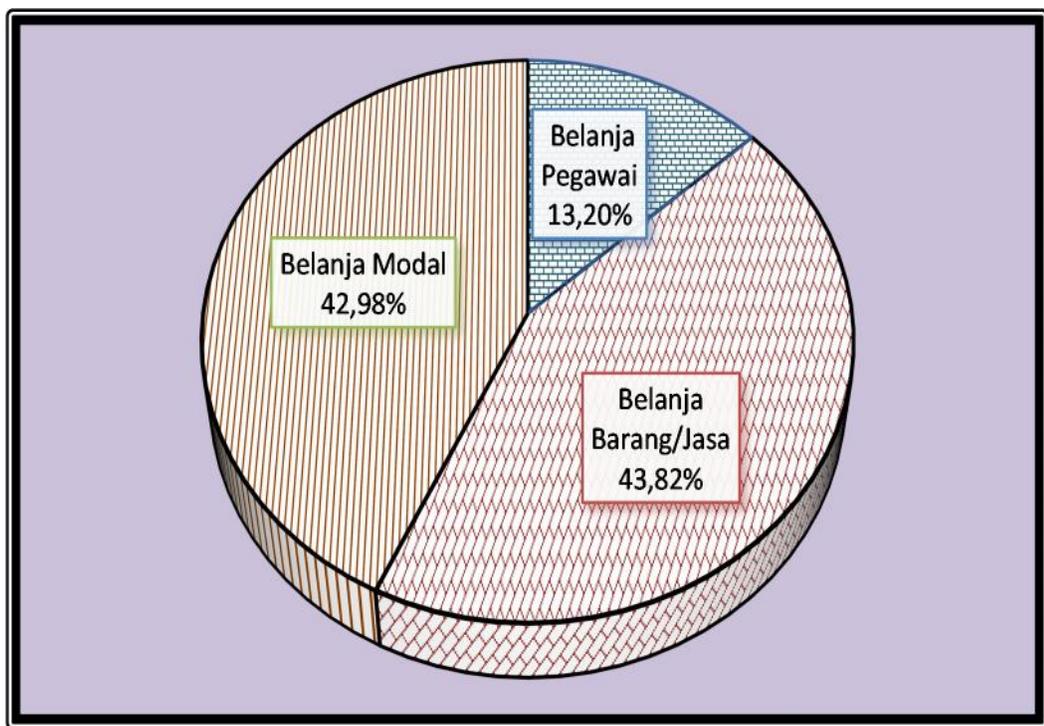


Gambar 2.5 **Komposisi Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2017**

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran bidang pendidikan telah mencapai 26,58% dari total anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Bogor dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20,00% dari total anggaran belanja daerah. Begitu juga untuk penyediaan anggaran Bidang Kesehatan telah mencapai 18,52% dari total belanja daerah, hal tersebut telah melampaui ketentuan pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa besaran anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10,00% (sepuluh persen) dari anggaran belanja daerah. Selain alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang telah melampaui batas minimal, proporsi alokasi anggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lainnya yang juga menjadi prioritas nasional, provinsi, maupun Kabupaten Bogor.

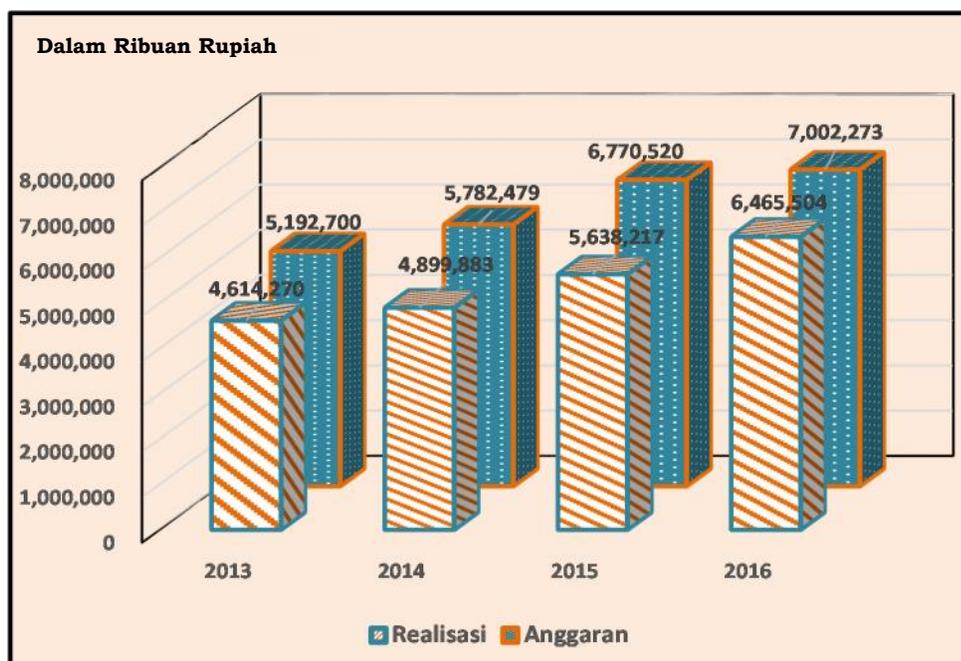
APBD Kabupaten Bogor senantiasa mendorong optimalisasi percepatan pembangunan daerah, tercermin dari alokasi proporsi anggaran belanja langsung paling besar dialokasikan untuk anggaran belanja modal Tahun 2017 yang mencapai 42,98% dari

total belanja langsung, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah (jalan, jembatan, irigasi, pasar, terminal dan lain-lain). Selain belanja modal, belanja daerah juga dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai guna mendorong, mendukung, serta meningkatkan kapasitas program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Gambaran komposisi per jenis belanja langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor, digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2.6 **Komposisi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017**

Dalam kurun waktu empat tahun (2013-2016), anggaran belanja daerah senantiasa meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah. Namun pada Tahun 2017 jumlah anggaran belanja daerah mencapai Rp 7.432.383.155.000,-, angka tersebut merupakan angka Perubahan APBD Tahun 2017.

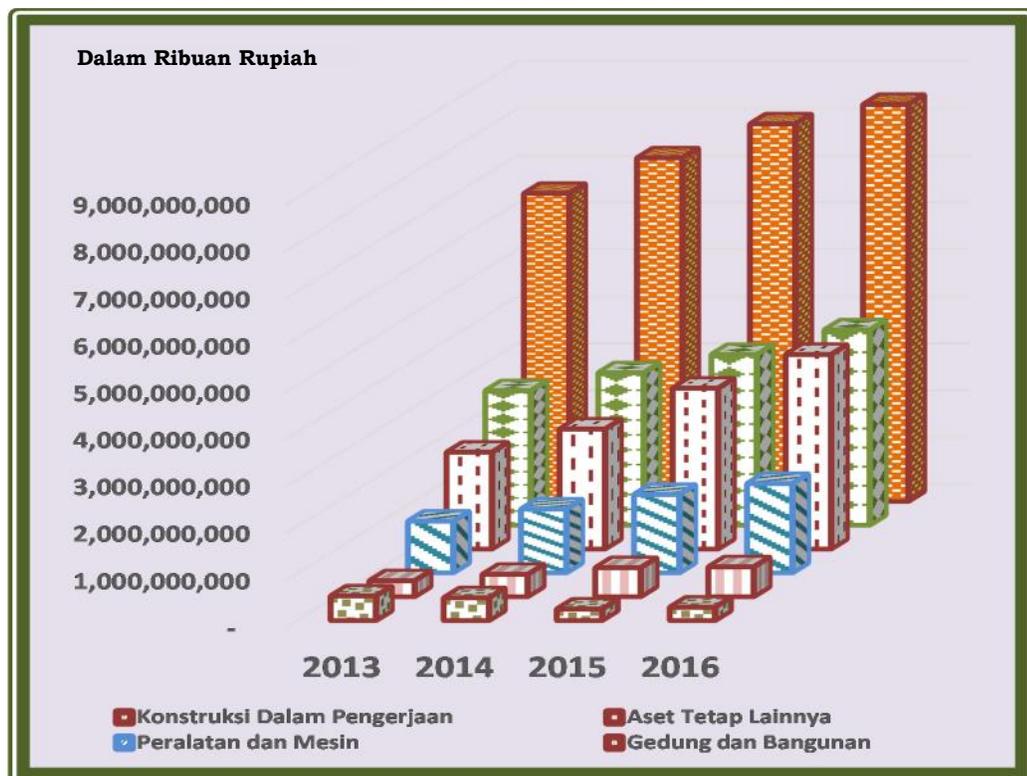


Gambar 2.7 **Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016**

Hal ini menunjukkan Kinerja APBD yang semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya belanja daerah serta realisasinya yang juga semakin baik. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan daerah berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor di tahun 2013-2015, nilai aset daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dari tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 20,98% karena ada kenaikan pada nilai kas dan setara kas serta nilai aset tetap Kabupaten Bogor karena adanya kenaikan SILPA dan efek dari pelaksanaan Sensus Barang pada Tahun 2013. Sedangkan dari tahun 2014 ke tahun 2015 nilai aset mengalami penurunan sebesar 2,85% karena mulai diterapkannya kebijakan

penyusutan atas nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan akibat dari diterapkannya Akuntansi Berbasis Akrual seperti yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat tahun anggaran 2015. Nilai aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 15.603.984.069.228,50 berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyajikan nilai aset tetap, dimana kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan barang milik daerah (aset tetap) ada di DPKBD. Sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, maka DPKBD melakukan konsolidasi data aset tetap dari SKPD untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bogor. Adapun perkembangan nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bogor sepanjang Tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :



Gambar 2.8 **Perkembangan Nilai Aset Tetap Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2016**

Dalam kurun waktu empat tahun total nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang fluktuatif, tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.979.741.196.439,32 atau 14,75% dari nilai aset tetap tahun 2013, hal ini merupakan efek dari kegiatan Sensus Barang yang dilaksanakan pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 turun sebesar Rp 1.178.539.125.124,39 atau (-7.65%) yaitu dari Rp 15.404.006.919.773,80 pada tahun 2014 menjadi Rp 14.225.467.794.649,40 pada tahun 2015. Hal ini disebabkan mulai diperhitungkannya nilai penyusutan untuk seluruh aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2016 nilai aset tetap naik sebesar Rp 1.378.516.274.579,13 atau sebesar 9,69% menjadi Rp 15.603.984.069.228,50. Rata-rata nilai aset tetap Kabupaten selama kurun waktu 2013-2016 naik sebesar 5,59%.

Nilai aset tetap masih didominasi oleh tanah setelah itu gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya. Nilai tanah dan aset tetap lainnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat karena tidak terkena depresiasi. Sedangkan nilai gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta peralatan dan mesin pada tahun 2015 menurun signifikan karena mulai diperhitungkan nilai depresiasinya. Nilai konstruksi dalam pengerjaan bersifat fluktuatif karena akan direklasifikasi menjadi aset gedung dan bangunan pada saat tingkat penyelesaiannya sudah mencapai 100,00%.

Begitupun halnya dengan nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2013-2014 mengalami penurunan sebesar 74,36% karena ada penurunan pada utang jangka pendek lainnya sedangkan dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 496,65%. Hal ini terjadi karena penerapan akuntansi berbasis akrual mengharuskan adanya pengakuan sebagai utang atas transaksi yang barang atau jasanya sudah diterima tetapi belum dibayar dan pendapatan yang pembayarannya sudah diterima akan tetapi barang atau jasanya belum diserahkan kepada pihak ke-3 oleh Pemerintah Kabupaten

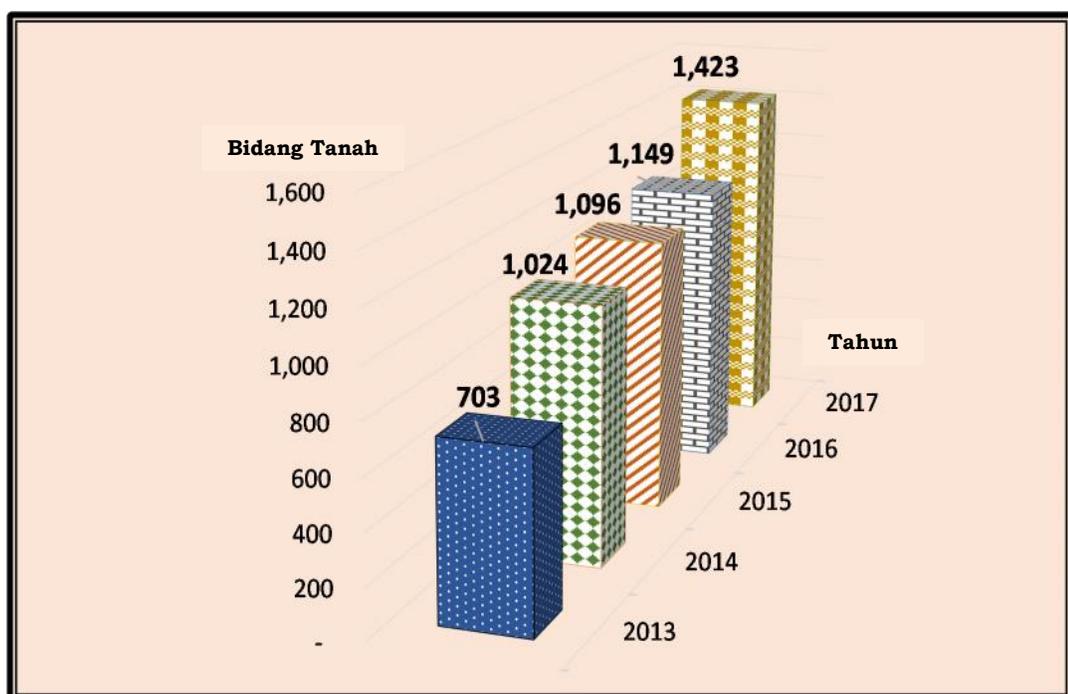
Bogor seperti pendapatan yang diterima dimuka, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya.

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 21,13% karena adanya kenaikan pada nilai ekuitas yang diinvestasikan sebagai akibat dari naiknya nilai aset tetap Kabupaten Bogor pada periode tersebut. Sedangkan pada periode 2014-2015 nilai ekuitas dana mengalami penurunan sebesar 3,12% yang berarti bahwa nilai penurunan aset yang disebabkan oleh adanya depresiasi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan utang Pemerintah Kabupaten Bogor, aset lancar, dana cadangan dan aset lainnya.

Selain melakukan pencatatan dan pengadministrasian barang milik daerah, DPKBD juga melakukan pengamanan terhadap aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor dengan cara melakukan penertiban aset serta melakukan pengoptimalan pemanfaatan aset dengan cara kerja sama BOT, pinjam pakai ataupun sewa menyewa, sehingga aset-aset yang tidak dimanfaatkan oleh SKPD lebih aman dari penyerobotan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengamanan aset juga dilakukan dengan cara penerbitan alas hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat. Upaya ini membuat jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bersertifikat dari tahun ke tahun terus meningkat seperti yang tersaji dalam gambar 2.8. Sepanjang tahun 2014-2016 upaya pengamanan aset disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.11 **Pengamanan Aset Sepanjang Tahun 2014-2016**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tingkat Realisasi Renstra (%)
			Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	
1.	Penerbitan Alas Hak Tanah	Jumlah Dokumen Alas Hak yang terbit	100 dokumen	100 dokumen	100.00	100 dokumen	100 dokumen	100.00	100 dokumen	100 dokumen	100.00	60.00
2.	Penerbitan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor	Jumlah Bidang Tanah yang diterbitkan	100 bidang tanah	100 bidang tanah	100.00	100 bidang tanah	100 bidang tanah	100.00	100 bidang tanah	100 bidang tanah	100.00	60.00
3.	Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bogor	Jumlah Dokumen Status Pengembalian Batas Tanah yang tersedia	15 GS	15 GS	100.00	15 GS	15 GS	100.00	15 GS	15 GS	100.00	60.00
4.	Pengamanan Administrasi Bangunan Milik Daerah (IMB Bangunan Pemda)	Jumlah bangunan SKPD yang memiliki IMB	-	-	-	4 SKPD	1 SKPD	25.00	4 SKPD	4 SKPD	100.00	31.25



Gambar 2.9 **Perkembangan Jumlah Aset Tetap berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang Telah Bersertifikat Tahun 2013-2017 (dalam satuan bidang tanah)**

Pencapaian kinerja DPKBD/BPKAD dalam kurun waktu 2014-2016 dapat digambarkan dari capaian fisik dari kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adanya dukungan pendanaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dikelola oleh DPKBD baik sebagai SKPD maupun SKPKD menunjukkan rata-rata kenaikan target sebesar 24,09% begitupun halnya realisasi PAD mengalami rata-rata kenaikan sebesar 3,02%, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan laba yang diperoleh BUMD yang mengakibatkan dividen yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ikut naik namun demikian pendapatan yang berasal dari pendapatan kontribusi (KSO) mengalami penurunan karena pendapatan kontribusi dari PT. Daihan selama 2 tahun terakhir tidak terealisasi hal ini dikarenakan adanya usulan adendum perjanjian kerja sama. Sedangkan komponen Belanja Tidak Langsung secara keseluruhan pertumbuhannya positif yaitu anggaran sebesar 23,81% dan realisasi sebesar 5,01%. Kenaikan pada belanja tidak langsung didominasi oleh belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan karena disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran dan realisasi belanja langsung selama kurun waktu 2013-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu anggaran belanja langsung pertumbuhannya sebesar 18,32% dan realisasi belanja langsung pertumbuhannya sebesar 0,37%.

Tabel 2.12 Review Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
I.	<b>TERTIB ADMINISTRASI DAN DOKUMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	-	-	78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
1.	Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				42 Dokumen	132 Dokumen	109 Dokumen	-	-	42 Dokumen	132 Dokumen	145 Dokumen	-	-	100.00%	100.00%	133.03%	-	-
2.	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				146 Peraturan	58 Peraturan	108 Peraturan	-	-	205 Peraturan	84 Peraturan	111 Peraturan	-	-	140.41%	144.83%	102.78%	-	-
3.	Jumlah Jaringan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah				1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	-	-	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
4.	Jumlah SKPD yang Dilayani				2 Aplikasi	1 Aplikasi	2 Aplikasi	-	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	50.00%	100.00%	50.00%	-	-
5.	Jumlah SPD yang Diterbitkan				78 SKPD	78 SKPD	78 SKPD	-	-	78 SKPD	78 SKPD	78 SKPD	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
6.	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah				410 SPD	410 SPD	410 SPD	-	-	565 SPD	537 SPD	592 SPD	-	-	137.80%	130.98%	144.39%	-	-
7.	Jumlah Transaksi Akuntansi yang Terbukukan				488 Orang	905 Orang	1051 Orang	-	-	390 Orang	535 Orang	655 Orang	-	-	79.92%	59.10%	62.32%	-	-
					63000 transaksi	36000 transaksi	72000 transaksi	-	-	66366 transaksi	67324 transaksi	89615 transaksi	-	-	105.34%	187.01%	124.47%	-	-
II.	<b>TERTIB ADMINISTRASI DAN DOKUMEN PENGELOLAAN BARANG DAERAH</b>				78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	-	-	78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	78 SKPD, 100%	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
1.	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				2,374,941,000	2,238,049,000	1,806,198,000	-	-	2,227,211,651	1,931,435,581	1,833,945,240	-	-	93.78%	86.30%	101.54%	-	-
2.	Jumlah dokumen mengenai pengelolaan barang milik daerah				114 Dokumen	108 Dokumen	114 Dokumen	-	-	114 Dokumen	108 Dokumen	114 Dokumen	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
3.	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah				80 Dokumen	51 Dokumen	60 Dokumen	-	-	64 Dokumen	76 Dokumen	73 Dokumen	-	-	80.00%	149.02%	121.67%	-	-
4.	Jumlah Profil Aset yang Dikembangkan				15 Kecamatan	-	1 Sistem	-	-	15 Kecamatan	-	1 Sistem	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
5.	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	-	-	3 Modul Aplikasi	2 Modul Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah Bidang Tanah yang Ditertibkan				78 SKPD	78 SKPD	78 SKPD	-	-	78 SKPD	78 SKPD	78 SKPD	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
7.	Jumlah Bidang Tanah yang Ditertibkan				100 Bidang Tanah	100 Bidang Tanah	100 Bidang Tanah	-	-	100 Bidang Tanah	100 Bidang Tanah	100 Bidang Tanah	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
8.	Jumlah Gambar Ukur Sementara				15 GS	15 GS	15 GS	-	-	15 GS	15 GS	15 GS	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-
	Jumlah Bangunan SKPD yang Memiliki IMB				-	4 SKPD	4 SKPD	-	-	-	1 SKPD	4 SKPD	-	-	-	25.00%	100.00%	-	-
1.	Ketepatan Waktu Penetapan APBD/ APBD Perubahan Kabupaten Bogor				-	-	-	Tepat	Tepat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				-	-	-	WTP	WTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina dan Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan				-	-	-	76 SKPD	76 SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Adanya Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah				-	-	-	Ada	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Adanya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah				-	-	-	Ada	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah				-	-	-	1,768,779,000	1,825,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	-	-	16 kegiatan	16 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur				-	-	-	11 kegiatan	11 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Terwujudnya Disiplin Aparatur				-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas				-	-	-	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah				-	-	-	9 kegiatan	9 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	% Realisasi
1.	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>79,396,577,000</b>	<b>88,233,342,000</b>	<b>133,237,623,000</b>	<b>146,469,164,000</b>	<b>145,105,657,000</b>	<b>109,654,044,638</b>	<b>96,256,458,737</b>	<b>125,521,785,042</b>	<b>191,680,782,844</b>	<b>193,506,251,771</b>	-	-	<b>121.24</b>	<b>142.26</b>	<b>143.86</b>	<b>132.11</b>	-	-	<b>24.02</b>	<b>3.43</b>
	Pendapatan Asli Daerah	79,396,577,000	88,233,342,000	133,237,623,000	146,469,164,000	145,105,657,000	109,654,044,638	96,256,458,737	125,521,785,042	191,680,782,844	193,506,251,771	-	-	121.24	142.26	143.86	132.11	-	-	24.02	3.43
	- Hasil Retribusi Daerah	1,298,266,000	1,670,911,000	1,258,967,000	1,072,916,000	1,072,916,000	1,072,916,638	1,305,654,192	1,767,687,331	1,368,635,581	1,573,648,615	-	-	100.57	105.79	108.71	146.67	-	-	(3.58)	14.29
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,244,856,000	15,109,074,000	41,428,025,000	43,992,572,000	43,593,952,000	35,094,563,000	13,244,856,928	15,109,074,955	40,142,252,390	43,075,638,051	-	-	100.00	100.00	96.90	97.92	-	-	64.82	(0.68)
	- Lain-lain PAD yang Sah	64,853,455,000	71,453,357,000	90,550,631,000	101,403,676,000	100,438,789,000	73,486,565,000	81,705,947,617	108,645,022,756	150,169,894,873	148,856,965,105	-	-	125.99	152.05	165.84	146.80	-	-	16.30	6.09
2.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>616,909,130,000</b>	<b>610,754,976,000</b>	<b>805,966,046,000</b>	<b>1,123,877,022,000</b>	<b>1,250,975,154,000</b>	<b>1,062,036,213,796</b>	<b>525,981,889,037</b>	<b>483,292,297,086</b>	<b>725,869,411,064</b>	<b>1,090,058,494,856</b>	-	-	<b>85.26</b>	<b>79.13</b>	<b>90.06</b>	<b>96.99</b>	-	-	<b>23.47</b>	<b>4.77</b>
	Belanja Tidak Langsung	589,559,940,000	576,954,121,000	766,409,009,000	1,078,649,818,000	1,216,478,472,000	1,028,601,690,796	500,595,054,193	452,873,531,314	690,904,065,490	1,047,708,297,243	-	-	84.91	78.49	90.15	97.13	-	-	23.81	5.01
	- Belanja Pegawai	6,571,517,000	8,981,487,000	9,342,510,000	9,684,899,000	9,426,380,000	10,151,104,000	6,339,581,324	8,652,994,627	9,027,887,148	9,415,519,658	-	-	96.47	96.34	96.63	97.22	-	-	14.79	0.26
	- Belanja Hibah	200,131,383,000	130,686,700,000	81,662,700,000	113,449,200,000	191,328,384,000	93,877,200,000	170,448,641,050	90,667,749,388	64,372,714,150	108,858,733,000	-	-	85.17	69.38	78.83	95.95	-	-	(11.10)	5.60
	- Belanja Bantuan Sosial	12,299,500,000	15,496,385,000	33,158,500,000	47,589,635,000	40,000,000,000	47,589,635,000	9,784,000,000	11,942,385,000	3,570,135,000	43,245,630,000	-	-	79.55	77.07	10.77	90.87	-	-	61.16	218.28
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan	84,153,922,000	97,632,832,000	97,632,832,000	109,600,156,000	109,600,156,000	109,600,155,796	78,015,626,964	95,088,516,722	86,715,113,223	109,557,277,652	-	-	92.71	97.39	88.82	99.96	-	-	9.42	2.93
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan	266,403,618,000	284,156,717,000	514,612,467,000	782,325,928,000	856,123,552,000	757,383,596,000	234,502,106,638	234,081,035,020	514,490,606,673	763,780,203,283	-	-	88.03	82.38	99.98	97.63	-	-	46.60	4.20
	- Belanja Tidak terduga	20,000,000,000	40,000,000,000	30,000,000,000	16,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	1,505,098,217	12,440,850,557	12,727,609,296	12,850,933,650	-	-	7.53	31.10	42.43	80.32	-	-	9.44	146.34
	Belanja Langsung	27,349,190,000	33,800,855,000	39,557,037,000	45,227,204,000	34,496,682,000	33,434,523,000	25,386,834,844	30,418,765,772	34,965,345,574	42,350,197,613	-	-	92.82	89.99	88.39	93.64	-	-	18.32	0.37
	- Belanja Pegawai	12,927,000,000	13,272,000,000	13,677,851,000	14,490,549,000	15,781,799,000	15,295,875,231	12,461,550,000	12,214,150,000	12,259,511,500	13,871,467,000	-	-	96.40	92.03	89.63	95.73	-	-	3.89	(0.11)
	- Belanja Barang dan Jasa	10,845,861,000	14,949,308,000	12,720,870,000	16,411,289,000	15,826,286,000	15,338,991,463	9,582,572,332	13,075,971,272	10,270,883,059	14,376,486,107	-	-	88.35	87.47	80.74	87.60	-	-	17.31	(0.07)
	- Belanja Modal	3,576,329,000	5,579,547,000	13,158,316,000	14,325,366,000	2,888,597,000	2,799,656,305	3,342,712,512	5,128,644,500	12,434,951,015	14,102,244,506	-	-	93.47	91.92	94.50	98.44	-	-	66.90	1.77
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>688,423,393,000</b>	<b>615,253,802,000</b>	<b>955,749,821,000</b>	<b>1,185,298,353,000</b>	<b>493,098,155,000</b>	<b>385,889,151,000</b>	<b>694,793,492,035</b>	<b>623,582,956,713</b>	<b>955,749,821,407</b>	<b>1,184,835,661,274</b>	-	-	<b>100.93</b>	<b>101.35</b>	<b>100.00</b>	<b>99.96</b>	-	-	<b>22.91</b>	<b>(0.32)</b>
	Penerimaan Pembiayaan	751,723,393,000	672,189,802,000	1,101,793,821,000	1,350,398,353,000	540,798,155,000	434,889,151,000	751,793,492,035	673,082,956,713	1,101,793,821,407	1,349,935,661,274	-	-	100.01	100.13	100.00	99.97	-	-	25.30	(0.01)
	Pengeluaran Pembiayaan	63,300,000,000	56,936,000,000	146,044,000,000	165,100,000,000	47,700,000,000	49,000,000,000	57,000,000,000	49,500,000,000	146,044,000,000	165,100,000,000	-	-	90.05	86.94	100.00	100.00	-	-	53.17	3.86

BPKAD memiliki fungsi ganda yaitu sebagai SKPKD dan SKPD dimana Kepala SKPKD bertindak sebagai PPKD sehingga berimplikasi pada besarnya anggaran yang menjadi tanggung jawab BPKAD. Belanja tidak langsung PPKD terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Dari kelima komponen belanja tersebut terjadi penurunan yang signifikan pada belanja hibah, hal ini disebabkan pada Tahun 2014 terdapat anggaran pengamanan Pilpres yang tidak dianggarkan lagi di Tahun 2015-2018.

Anggaran belanja untuk menunjang kegiatan DPKBD/BPKAD selaku SKPD, komponennya meliputi belanja tidak langsung yaitu anggaran belanja pegawai untuk membayar gaji pegawai DPKBD (PNS) selama kurun waktu 2013-2016 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 14,79%, begitu juga dengan realisasi belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,25%. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan anggaran belanja tidak langsung pegawai sudah mendekati kondisi riil pegawai. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2013-2016 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 5,01%. Peningkatan anggaran belanja tidak langsung selama kurun waktu 2013-2016 karena adanya penambahan jumlah pegawai dari 86 orang menjadi 87 orang dan adanya pegawai yang naik pangkat sehingga berimplikasi pada besaran gaji pegawai tersebut serta adanya kebijakan alokasi gaji ke-14 sejak tahun 2015.

Pada komponen belanja langsung rata-rata peningkatan anggaran belanja sebesar 18,32% dan realisasinya sebesar 0,37%. Penambahan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Jika dilihat rasio capaian belanja langsung di Tahun 2015 lebih kecil dibandingkan Tahun 2014 sebesar 1,6%, hal ini disebabkan adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp 354.798.000,- sampai dengan 31 Desember 2015 tidak dapat direalisasikan karena Juklak Penatausahaan Keuangan yang

akan disampaikan kepada SKPD belum final pembahasannya di Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah. Realisasi belanja langsung pada Tahun 2014 mencapai 89,99% dan 2015 sebesar 88,39%, dimana anggaran yang tidak terserap disebabkan adanya efisiensi pada pos belanja perjalanan dinas, penggandaan, makanan dan minuman rapat, selisih penawaran pada belanja modal dan pengadaan barang/jasa yang menggunakan penyedia, serta pencairan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah hari kerja efektif.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BPKAD**

BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BPKAD Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tentunya berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode SWOT Analisis, yang memetakan lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity*

(Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

## **1. Lingkungan Internal**

### **KEKUATAN (S):**

1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai;
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif;
4. Adanya SIPKD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Departemen Dalam Negeri yang digunakan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan terintegrasi antara Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD;
5. Adanya ATISISBADA sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah).

### **KELEMAHAN (W):**

1. Kualitas pegawai belum memadai;
2. Kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah termasuk Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Masih kurangnya jumlah pegawai pada BPKAD (kuantitas);
4. Belum terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal.

## **2. Lingkungan Eksternal**

### **PELUANG (O):**

1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data;
2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Forkopimda di Kabupaten Bogor;
3. Dekatnya Ibu Kota Kabupaten Bogor dengan Ibu Kota Negara dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

### **ANCAMAN (T):**

1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola;
3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antara Perangkat Daerah/Kecamatan;
4. Adanya rotasi/mutasi SDM di Perangkat Daerah /Kecamatan.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKAD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Pengelolaan keuangan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini lebih disebabkan belum adanya pemahaman yang mendalam dari aparatur mengenai perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada periode 2014-2016 belum diimplementasikan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum akuratnya data mengenai jumlah dan jenis barang daerah yang dimiliki serta terdapat beberapa barang milik daerah belum lengkapnya bukti kepemilikannya atas barang tersebut.

##### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Perumusan visi dan misi Kabupaten Bogor memerlukan landasan filosofis yang digali dari nilai-nilai budaya dan sejarah perkembangan masyarakatnya. Landasan filosofis ini harus dapat memberikan wawasan mengenai kondisi alam dan kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bogor. Semboyan Prayoga, Tohaga, Sayaga, serta moto juang Tegar Beriman (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) menjiwai seluruh pernyataan visi dan misi Kabupaten Bogor. Prayoga, Tohaga, Sayaga berarti mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian dan perjuangan. Sedangkan Tegar Beriman menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju dan

sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang tertuang Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kebijakan nasional dan pemekaran daerah, serta penyelarasan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, dan menyikapi perkembangan pembangunan di daerah maka Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Menurut pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat sejalan dengan perubahan RPJMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 pada tanggal 9 Juni 2017 bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah

**“MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“.**

Pernyataan visi bermakna bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Ter maju juga berarti bahwa Kabupaten Bogor sebagai suatu wilayah terus melakukan pengembangan diri untuk menyesuaikan

diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. Adapun termaju merupakan suatu kondisi yang pencapaiannya dapat diukur dengan melihat 25 penciri yang terdiri dari :

1. Terbangunnya Mesjid Besar di setiap kecamatan;
2. Penduduk miskin turun menjadi 8,9 sampai 7,00 persen;
3. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional;
4. Pelayanan perijinan berstandar ISO;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional;
6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia;
7. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia;
8. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan;
9. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia;
10. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat;
11. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia;
12. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
13. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang mantap;
14. Tidak ada daerah terisolir;
15. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
16. Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun;
17. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun;
18. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;
19. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan;
20. Seluruh RSUD dan UPT Puskesmas terakreditasi;
21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
22. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia;
23. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el;

24. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
25. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa.

Membandingkan penciri tersebut dengan kabupaten lain di Indonesia dengan harapan dapat memotivasi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor pada kondisi aman, sentosa, makmur (telah terpenuhinya kebutuhan dasar) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan pencapaian IPM dalam lima tahun ke depan.

Dari 25 penciri Termaju Kabupaten Bogor yang menjadi tanggung jawab BPKAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu penciri ke-21 “Mencapai Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam upaya memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka sedikitnya ada 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Keempat kriteria tersebut juga harus dipenuhi dalam penyusunan Laporan Keuangan PD yang menjadi dasar untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pencapaian kriteria tersebut perlu adanya kerja sama yang baik dari semua perangkat daerah sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2016 dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2017 mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dari Tim Pemeriksa BPK RI. Untuk selanjutnya strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh BPKAD akan dititikberatkan pada bagaimana caranya mempertahankan opini tersebut agar dapat terus diraih pada tahun-tahun yang akan datang. Hal ini dikarenakan pencapaian WTP tidak hanya bertumpu pada BPKAD semata namun tetap harus melibatkan seluruh PD

karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan PD.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah:

❖ Misi Pertama :

Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

❖ Misi Kedua :

Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;

❖ Misi Ketiga :

Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

❖ Misi Keempat :

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;

❖ Misi Kelima :

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas sebagai berikut:

Misi Pertama yaitu meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial masyarakat, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat.

Misi Kedua yaitu meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga yaitu meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuatitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

Misi Keempat yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya

akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.

Misi Kelima yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

BPKAD sesuai tugas dan fungsinya akan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran dari Misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan indikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dengan target opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Adapun strategi yang dirancang untuk merealisasikan sasaran tersebut adalah Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan transparansi, validitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah; dan
2. Efektivitas perencanaan dan penatausahaan serta optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.

Strategi dan arah kebijakan tersebut direalisasikan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Daerah.

### 3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPKAD Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan barang daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan juga analisa SWOT yang telah dilakukan pada bab 2, sebagai berikut :

Tabel 3.1 **Pemetaan Analisa SWOT BPKAD**

Internal	Eksternal
<b>(+) Kekuatan</b>	<b>(+) Peluang</b>
1. Adanya perubahan SOTK yang menyebabkan lingkup tupoksi BPKAD menjadi lebih luas	1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data  2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota <b>Forkopimda</b> di Kabupaten Bogor  3. Dekatnya Ibukota Kabupaten Bogor dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai	
3. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah	
4. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif	
5. Adanya SIPKD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Departemen Dalam Negeri yang digunakan oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan terintegrasi antara Perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD	
5. Adanya ATISISBADA sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan BPKAD (selaku Pejabat Penatausahaan Barang Daerah)	
<b>(-) Kelemahan</b>	<b>(-) Ancaman</b>
1. Kualitas pegawai belum memadai	1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Kemampuan SDM yang tidak merata di Perangkat Daerah/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola

Internal	Eksternal
3. Masih kurangnya jumlah pegawai pada BPKAD (kuantitas)	3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar Perangkat Daerah /Kecamatan
4. Belum terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal	4. Adanya rotasi SDM di Perangkat Daerah/Kecamatan

Berdasarkan tabel pemetaan tersebut, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas untuk lima tahun ke depan (2013-2018):

### **Strategi S-O**

Strategi S-O merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O yang diterapkan yaitu penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara online dan terintegrasi dengan seluruh PD.

### **Strategi W-O**

Strategi W-O merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi W-O yang diterapkan yaitu peningkatan kapabilitas pegawai.

### **Strategi S-T**

Strategi S-T merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Strategi S-T yang diterapkan yaitu peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **Strategi W-T**

Strategi W-T merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat menanggulangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang diterapkan yaitu penyesuaian peraturan perundang-undangan yang

ada di daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Misi Kabupaten Bogor yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi yang ke-lima yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuan strategis yang ditetapkan BPKAD dalam 5 tahun mengacu kepada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPKAD seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran yang ingin dicapai pada misi ke-lima yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BPKAD. Sasaran ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yang dicapai bersama dengan 76 PD dan merupakan sasaran penunjang bagi

setiap PD. Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, strategi yang diterapkan adalah Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dengan arah kebijakan yaitu :

1. Perencanaan Keuangan yang Transparan serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel; dan
2. Efektivitas Perencanaan dan Penatausahaan serta Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut di atas kemudian ditetapkan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun indikator kinerja RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kabupaten Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 maka ditetapkan tujuan dan sasaran BPKAD yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2013-2018. Tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel di Perangkat Daerah dengan indikator tujuan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan target “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BPKAD.

Sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah akan dicapai melalui Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja “WTP”;
- b. Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja “100,00% (76 PD)”.

Sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target kinerja “100,00% (76 PD)”.

Sasaran yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BPKAD. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator:

1. Persentase Aset dalam Kondisi Baik dengan target tahun 2017 sebesar 75,00% dan tahun 2018 sebesar 80,00%;
2. Nilai AKIP BPKAD dengan target B baik di tahun 2017 maupun 2018; dan
3. Temuan Materil sebanyak 2 temuan baik di tahun 2017 maupun 2018.

Sasaran ini akan dicapai melalui program penunjang, yaitu:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan target kinerja sebanyak 15 kegiatan di tahun 2017 dan 16 kegiatan di tahun 2018;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur dan target kinerja sebanyak 13 kegiatan di tahun 2017 dan 11 kegiatan di tahun 2018;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur dan target kinerja sebanyak 1 kegiatan di tahun 2017 dan 2 kegiatan di tahun 2018;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Terwujudnya Sumber Daya yang Berkualitas dan target

kinerja sebanyak 2 kegiatan di tahun 2017 dan 3 kegiatan di tahun 2018; dan

- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan PD dan target kinerja sebanyak 9 kegiatan baik di tahun 2017 maupun tahun 2018.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan BPKAD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini:



**Tabel 4.1.b.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Tahun 2017-2018**

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
I.	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel di Perangkat Daerah	76 PD	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
			2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP	100,00% (76 PD)	100,00% (76 PD)
				Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	100,00% (76 PD)	100,00% (76 PD)

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan tujuan, sasaran, dan target yang hendak dicapai oleh BPKAD, maka terdapat indikator sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor pada Perubahan Renstra tahun 2013-2018. Adapun program/kegiatan utama dan program/kegiatan penunjang yang akan dilaksanakan oleh BPKAD terdiri dari 7 program dan 88 kegiatan.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” akan diukur dengan indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target kinerja “WTP” dan Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP dengan target kinerja “100,00% (76 PD)” akan dicapai melalui program utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini akan diselesaikan melalui 33 kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Penyusunan dan Pengadministrasian SPD;
9. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan;
10. Verifikasi dan Penelitian RKA/DPA;
11. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah;
12. Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas;

13. Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai;
14. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan;
15. Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Updating Data Pegawai;
17. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Pengelolaan Anggaran Pendapatan;
19. Pengelolaan Pembiayaan Daerah;
20. Penatausahaan dan Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah;
21. Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
23. Pengadministrasian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TP/TGR);
24. Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal;
25. Revisi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
26. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD;
27. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah;
28. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
29. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
31. Pengelolaan Anggaran PPKD;
32. Penyusunan Perencanaan Pembiayaan;
33. Penyusunan Anggaran Berbasis SIMPEL.

Sasaran lain yang hendak dicapai oleh BPKAD yaitu “Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah” dan akan diukur dengan indikator Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik dengan target kinerja “100,00% (76 PD)”. Sasaran ini

akan dicapai melalui Program Pengelolaan Barang Daerah dengan 16 kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan;
2. Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa;
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
5. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Pemutahiran Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Penerbitan Alas Hak Tanah;
8. Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
9. Pendayagunaan Barang Pemerintah Kabupaten Bogor;
10. Pengamanan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bogor;
11. Pengembalian Batas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor;
12. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
14. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Legalisasi Ijin Bangunan/Gedung Milik Daerah
16. Sensus Barang Daerah.

Sasaran ketiga yang hendak dicapai oleh BPKAD yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BPKAD” dan akan diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Persentase Aset dalam Kondisi Baik;
2. Nilai AKIP BPKAD; dan
3. Temuan Materil.

Sasaran ini akan dicapai melalui program penunjang yang terdiri dari 5 program dan 45 kegiatan, yaitu:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
- l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
- m. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD;
- n. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang;
- o. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor;
- p. Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- q. Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pembangunan Gedung Kantor;
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- c. Pengadaan Peralatan Kantor;
- d. Pengadaan Perlengkapan Kantor;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor;
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi;
- k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi;

- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur SIPKD;
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Barang Milik Daerah;
- o. Rehabilitasi Ringan Gudang Barang Milik Daerah.

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur;

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- d. Penyusunan Perencanaan Anggaran;
- e. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;
- f. Penatausahaan Keuangan SKPD;
- g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD;
- h. Publikasi Kinerja SKPD;
- i. Penyusunan Renja SKPD;
- j. Penyusunan Renstra SKPD.

Terkait dengan adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka diperlukan beberapa penyesuaian terutama pada nama unit kerja Perangkat Daerah dari Seksi menjadi Sub Bidang dan pada beberapa nomenklatur dan target kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan tugas dan fungsi BPKAD seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain itu terdapat beberapa perubahan pada dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mengakibatkan perlu adanya penyesuaian dalam nomenklatur kegiatan, struktur organisasi dan target kegiatan. Perubahan-perubahan tersebut adalah :

I. Perubahan Nomenklatur Kegiatan, yaitu :

**a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD menjadi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Pengelolaan Anggaran Pendapatan menjadi Pengelolaan Anggaran PPKD;
5. Pengelolaan Pembiayaan Daerah menjadi Penyusunan Perencanaan Pembiayaan;

**b. Program Pengelolaan Barang Daerah**

1. Penyusunan Buku Daftar Harga Tertinggi menjadi Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa;
2. Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah menjadi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

3. Pengamanan Administrasi Bangunan Milik Daerah (IMB Bangunan Pemda) menjadi Legalisasi Ijin Bangunan/Gedung Milik Daerah;
4. Sensus Barang Daerah menjadi Inventarisasi Barang Milik Daerah.

II. Kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan lagi di tahun 2017 dan 2018, yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu kegiatan Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
2. Program Pengelolaan Barang Daerah, yaitu kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan di Bidang Pengelolaan Barang Daerah.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu kegiatan :
  - a. Pembangunan Gedung Kantor;
  - b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yaitu kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yaitu kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

III. Kegiatan-kegiatan baru yang direncanakan pada tahun 2017 dan 2018, yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu kegiatan :
  - a. Revisi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
  - b. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Banprop Jabar);

- c. Penyusunan Anggaran Berbasis SIMPEL.
2. Program Pengelolaan Barang Daerah, yaitu kegiatan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu kegiatan :
  - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Barang Milik Daerah;
  - b. Rehabilitasi Ringan Gudang Barang Milik Daerah.

BPKAD sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pengkoordinasian untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah maka terdapat program/kegiatan yang pelaksanaannya lintas Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 Program dan 42 Kegiatan, yaitu :

**1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :**

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- g. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Penyusunan dan Pengadministrasian SPD;
- i. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan;
- j. Verifikasi dan Penelitian RKA/DPA;
- k. Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas;

- l. Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai;
- m. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan;
- n. Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- o. Updating Data Pegawai;
- p. Pengelolaan Anggaran Pendapatan;
- q. Pengelolaan Pembiayaan Daerah;
- r. Penatausahaan dan Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah;
- s. Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- t. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- u. Pengadministrasian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TP/TGR);
- v. Revisi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- w. Revisi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
- x. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD;
- y. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah;
- z. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- aa. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- bb. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- cc. Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Banprop Jabar);
- dd. Penyusunan Anggaran Berbasis SIMPEL.

## **2. Program Pengelolaan Barang Daerah**

- a. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan;
- b. Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

- c. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
- e. Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- f. Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
- g. Pengamanan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- h. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor;
- j. Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Legalisasi Ijin Bangunan/Gedung Milik Daerah;
- l. Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat terlihat dalam tabel 5.1.a. dan 5.1.b. sebagai berikut :

Tabel 5.1.a. **Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2016**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1. Peningkatan kualitas sistem perencanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah	Tertatanya administrasi dan pertanggung jawaban keuangan daerah	Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	17	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah		78 SKPD 100,00%	15,596,904,875	78 SKPD 100,00%	13,475,969,862	78 SKPD 100,00%	15,887,829,850	78 SKPD 100,00%	44,960,704,587		
			17.0006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rancangan Perda APBD yang tersusun	2 Raperda	2 Raperda	971,567,800	2 Raperda	757,723,400	2 Raperda	922,899,400	6 Raperda	2,652,190,600	Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD yang tersusun	2 Raperbup	3 Raperbup	859,072,148	3 Raperbup	645,466,600	3 Raperbup	937,589,900	9 Raperbup	2,442,128,648	Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda	848,192,800	1 Raperda	699,875,000	1 Raperda	914,382,800	3 Raperda	2,462,450,600	Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 Raperbup	1 Raperbup	570,436,100	1 Raperbup	564,930,400	1 Raperbup	550,368,800	3 Raperbup	1,685,735,300	Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Raperda	1 Raperda	780,777,350	1 Raperda	559,231,200	1 Raperda	583,628,075	3 Raperda	1,923,636,625	Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0011	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Raperbup	1 Raperbup	488,619,520	1 Raperbup	341,233,950	1 Raperbup	504,027,550	3 Raperbup	1,333,881,020	Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0014	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	130 Orang	200,395,810	316 Orang	217,100,600	264 Orang	253,566,500	710 Orang	671,062,910	Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
17.0020	Penyusunan dan Pengadministrasian SPD	Surat Penyediaan Dana yang tersusun	515 SPD	410 SPD	771,030,700	537 SPD	797,201,750	592 SPD	924,632,400	1539 SPD	2,492,864,850	Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			17.0021	Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan	Laporan Realisasi Anggaran Bulanan yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	799,472,430	12 Dokumen	651,175,190	12 Dokumen	835,658,100	36 Dokumen	2,286,305,720	Seksi Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0022	Verifikasi dan Penelitian RKA/DPA	SKPD yang RKA/DPA nya diverifikasi dan diteliti	156 Dokumen	78 SKPD	992,470,990	78 SKPD	716,711,500	78 SKPD	945,991,000	78 SKPD	2,655,173,490	Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0023	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	359,438,502	1 Dokumen	330,210,572	1 Dokumen	371,546,300	3 Dokumen	1,061,195,374	Seksi Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0024	Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas	SP2D Belanja Langsung, Advís Belanja Langsung, Laporan Kas, dan Laporan Pajak	4 Dokumen	4 Dokumen	914,278,925	4 Dokumen	940,318,600	4 Dokumen	980,226,250	12 Dokumen	2,834,823,775	Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0025	Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai	Daftar Gaji PNS, Laporan Rekapitulasi Gaji	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	820,700,600	6 Jenis Dokumen	815,731,150	6 Jenis Dokumen	872,087,400	18 Jenis Dokumen	2,508,519,150	Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0027	Penatausahaan Belanja Tidak langsung Non Pegawai dan Pembiayaan	Dokumen Belanja Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang tersedia	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	883,456,400	3 Jenis Dokumen	880,941,200	3 Jenis Dokumen	932,068,650	9 Jenis Dokumen	2,696,466,250	Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0038	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	1 Jaringan Sistem	1 Jaringan Sistem 2 Aplikasi	137,260,000	1 Jaringan Sistem 3 Aplikasi	172,800,000	1 Jaringan Sistem 3 Aplikasi	144,000,000	1 Jaringan Sistem 3 Aplikasi	454,060,000	Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0050	Updating Data Pegawai	Jumlah SKPD yang data pegawainya terupdate	78 SKPD	78 SKPD	485,700,000	78 SKPD	525,580,000	78 SKPD	612,118,450	78 SKPD	1,623,398,450	Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0051	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	80 Dokumen	133 Dokumen	389,115,000	76 Dokumen	323,708,850	103 Dokumen	340,760,000	312 Dokumen	1,053,583,850	Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			17 0066	Pengelolaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	491,035,050	1 Dokumen	478,846,600	1 Dokumen	511,497,100	3 Dokumen	1,481,378,750	Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17 0067	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Pembiayaan Daerah yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	119,949,000	-	-	-	-	1 Dokumen	119,949,000	Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17 0068	Penatausahaan dan Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah	Jurnal transaksi keuangan harian yang tersusun	36000 Transaksi	63000 Transaksi	812,625,000	67324 Transaksi	957,382,300	89615 Transaksi	921,391,800	219939 Transaksi	2,691,399,100	Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0069	Pendampingan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	SKPD yang difasilitasi dalam penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	78 SKPD	78 SKPD	868,040,600	78 SKPD	615,554,250	78 SKPD	822,260,575	78 SKPD	2,305,855,425	Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0078	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	SKPD yang didampingi dalam penyusunan laporan keuangannya	78 SKPD	78 SKPD	463,761,400	78 SKPD	356,188,500	78 SKPD	474,501,700	78 SKPD	1,294,451,600	Seksi Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0102	Pengadministrasian Tuntutan Pembendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TP/TGR)	Data Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	158,067,350	12 Dokumen	341,624,700	12 Dokumen	247,582,400	36 Dokumen	747,274,450	Seksi Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0111	Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	- Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi - Rancangan Peraturan Bupati tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah - Sosialisasi Kebijakan SAP yang terbaru	- - -	1 Raperbup 1 Raperbup 156 Orang	483,743,200	- - -	- - -	- - -	- - -	1 Raperbup 1 Raperbup 156 Dokumen	483,743,200	Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0120	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/ Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD	Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan APBD yang tersusun	-	1 Dokumen	218,300,000	1 Dokumen	217,178,250	1 Dokumen	282,131,600	3 Dokumen	717,609,850	Seksi Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI		
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.				
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2. Peningkatan kualitas pengelolaan dan optimalisasi fungsi barang milik daerah dalam pelayanan kepada masyarakat	Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban barang daerah	Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang daerah	17 0121	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/ Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah	Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah yang tersusun	-	1 Dokumen	205,969,000	-	-	1 Dokumen	199,396,600	2 Dokumen	405,365,600	Seksi Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong		
			17 0122	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna	1 Jaringan	1 Sistem	216,725,000	2 Sistem	197,000,000	2 Sistem	179,659,000	2 Sistem	593,384,000	Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong		
			17 0123	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	78 SKPD	301,023,000	78 SKPD	301,023,000	Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong	
			17 0124	Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi SIPKD	Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Keuangan Daerah	383 Orang	381 Orang	286,704,200	368 Orang	372,255,300	312 Orang	322,834,500	1061 Orang	981,794,000	Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong		
			18	Program Pengelolaan Barang Daerah	Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah	78 SKPD 100%	3,907,796,495	78 SKPD 100%	4,487,698,050	78 SKPD 100%	4,555,149,989	78 SKPD 100%	12,950,644,534					
			18 0001	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan	Laporan Hasil Pengadaan Belanja Modal dan Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	343,079,000	2 Dokumen	317,285,600	2 Dokumen	285,878,199	6 Dokumen	946,242,799	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong		
			18 0002	Penyusunan Buku Daftar Harga Tertinggi	Rancangan Perbup tentang SHT Barang/Jasa yang tersusun	2 Raperbup	2 Raperbup	277,196,900	2 Raperbup	264,349,000	2 Raperbup	269,327,065	6 Raperbup	810,872,965	Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong		
			18 0003	Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	4 Dokumen	180,012,750	4 Dokumen	148,035,000	4 Dokumen	171,499,659	12 Dokumen	499,547,409	Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			18.0005	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen Daftar Kebutuhan Barang Daerah dan Perubahan yang tersusun	4 Rakepbup	4 Rakepbup	204,169,600	4 Rakepbup	160,825,000	4 Rakepbup	178,878,474	12 Rakepbup	543,873,074	Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0007	Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Monitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1 Dokumen	136,511,125	1 Dokumen	173,206,000	1 Dokumen	193,094,550	3 Dokumen	502,811,675	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0011	Pemutahiran Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Buku Induk Inventaris Barang Daerah yang tersusun	-	1 Dokumen	396,870,000	1 Dokumen	465,611,500	1 Dokumen	459,411,720	3 Dokumen	1,321,893,220	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0015	Penerbitan Alas Hak Tanah	Dokumen Alas Hak Tanah yang terbit	100 Berkas	100 Berkas	338,496,200	100 Berkas	322,156,050	100 Berkas	323,966,300	300 Berkas	984,618,550	Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0016	Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor	Rancangan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset Daerah	12 Rakepbup	20 Rakepbup	481,398,450	20 Rakepbup	425,642,000	20 Rakepbup	379,629,210	60 Rakepbup	1,286,669,660	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0017	Pendayagunaan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor	Rancangan Keputusan Bupati tentang Pendayagunaan Aset Daerah yang tersusun	30 Rakepbup	30 Rakepbup	287,446,450	50 Rakepbup	321,381,300	53 Rakepbup	362,614,450	133 Rakepbup	971,442,200	Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0018	Penerbitan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor	Bidang tanah yang diterbitkan	15 Bidang Tanah	100 Bidang Tanah	356,227,200	100 Bidang Tanah	382,475,000	100 Bidang Tanah	441,743,950	300 Bidang Tanah	1,180,446,150	Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0019	Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen Status Pengembalian Batas Tanah yang tersedia	14 GS	15 GS	198,743,750	15 GS	913,689,000	15 GS	201,010,750	45 GS	1,313,443,500	Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18.0020	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah	78 Orang	78 SKPD	150,987,500	78 SKPD	123,254,600	78 SKPD	487,367,450	78 SKPD	761,609,550	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		RENSTRA SKPD (2016)			
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			18 0025	Pengamanan Administrasi Bangunan Milik Daerah (IMB Bangunan Pemda)	Bangunan SKPD yang Memiliki IMB	-	-	-	1 SKPD	39,800,000	4 SKPD	202,658,870	5 SKPD	242,458,870	Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18 0030	Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor	Modul Profil Barang Milik Pemerintah Daerah yang dikembangkan	-	15 Kecamatan	556,657,570	2 Modul Aplikasi	429,988,000	2 Modul Aplikasi	279,283,750	15 Kecamatan	1,265,929,320	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
			18 0031	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan di Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Rancangan Peraturan dan Keputusan di Bidang Pengelolaan Barang Daerah	-	-	-	-	-	1 Raperda Pengelolaan BMD	318,785,592	1 Raperda Pengelolaan BMD	318,785,592	Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah	Kec. Cibinong
3. Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan keuangan dan barang daerah	1. Terwujudnya perencanaan pengadaan barang yang akurat dan pemanfaatan barang milk daerah yang optimal serta penataan barang milk daerah yang tertib	1. Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	2,796,967,958	-	2,800,438,660	-	3,106,925,607	-	8,704,332,225		
			01 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai yang Tersedia - Materai 6000 - Materai 3000	720 Lembar 720 Lembar	800 Lembar 800 Lembar	6,240,000	-	-	-	-	800 Lembar 800 Lembar	6,240,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jaringan telepon - Jaringan Internet - Jaringan listrik - Jaringan Air - Transaksi Perbankan	5 Jaringan 4 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Bank	5 Jaringan 4 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Bank	595,081,863	5 Jaringan 4 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Bank	546,614,190	5 Jaringan 4 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Bank	598,999,682	5 Jaringan 4 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Bank	1,740,695,735	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbaharui - Roda 4 - Roda 2	18 Unit 12 Unit	17 Unit 12 Unit	14,872,000	13 Unit 25 Unit	18,577,300	13 Unit 25 Unit	29,321,100	65 Unit 125 Unit	62,770,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			01.0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Luas area yang dibersihkan - Petugas yang dibiayai	2945 m2 8 Orang	2945 m2 8 Orang	200,772,850	2945 m2 8 Orang	208,487,200	2945 m2 8 Orang	310,324,600	2945 m2 8 Orang	719,584,650	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK yang tersedia	23 Jenis	30 Jenis	116,971,650	30 Jenis	82,863,300	30 Jenis	184,626,685	30 Jenis	384,461,635	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Cetakan yang tersedia - Penggandaan yang tersedia	22 Jenis 210400 Lembar	19 Jenis 75000 Lembar	74,933,600	19 Jenis 50000 Lembar	164,569,850	19 Jenis 50000 Lembar	129,787,300	19 Jenis 175000 Lembar	369,290,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	12 Jenis	15 Jenis	19,748,700	14 Jenis	15,116,350	14 Jenis	148,280,000	14 Jenis	183,145,050	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	- Berlangganan Surat Kabar - Berlangganan Majalah - Buku Peraturan Perundang-Undangan	33 Jenis 1 Jenis 4 Jenis	36 Eksemplar - 6 Jenis	66,489,500 - -	39 Eksemplar - -	121,077,265 - -	39 Eksemplar - -	85,185,000 - -	114 Eksemplar - 6 Jenis	272,751,765	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Pembelian Bahan Bakar - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	210 Liter 9 Tabung	240 Liter 9 Tabung	4,873,445	- 9 Tabung	4,841,000	120 Liter 9 Tabung	6,135,000	360 Liter 27 Tabung	15,849,445	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu yang tersedia	133 Kali	185 Kali	231,740,000	100 Kali	172,395,000	146 Kali	216,560,000	431 Kali	620,695,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01.0018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah	138 Kali 62 Kali	58 Kali 30 Kali	292,056,010	47 Kali 73 Kali	295,400,505	56 Kali 78 Kali	117,925,607	161 Kali 181 Kali	705,382,122	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			01	0019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran - Tenaga Kontrak yang Dibayar - Pengelola Kearsipan yang Dibayar	3 Orang 5 Orang	3 Orang 5 Orang	44,200,000	3 Orang 5 Orang	37,602,000	2 Orang	62,767,000	3 Orang 5 Orang	144,569,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0020	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Dokumen Arsip yang Dipelihara	3 Dokumen	4 Jenis Dokumen	524,980,400	4 Jenis Dokumen	573,810,750	4 Jenis Dokumen	503,582,400	4 Dokumen	1,602,373,550	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0022	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Pengelolaan Administrasi Barang yang Terlaksana	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	14,877,000	5 Jenis Dokumen	5,595,550	5 Jenis Dokumen	30,182,500	5 Jenis Dokumen	50,655,050	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0040	Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	5 Jenis Dokumen	5 Dokumen	305,530,940	5 Jenis Dokumen	271,896,400	5 Jenis Dokumen	410,691,983	5 Jenis Dokumen	988,119,323	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0043	Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran Petugas Piket Pengamanan Kantor yang Dibayar	8 Orang	9 Orang	283,600,000	9 Orang	281,592,000	12 Orang	272,556,750	12 Orang	837,748,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
		2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja DPKBD	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja DPKBD	-	-	6,514,235,444	-	12,136,810,352	-	15,955,781,394	-	34,606,827,190		
			02	0003	Pembangunan Gedung Kantor - Tersusunnya DED - Terbangunnya Gedung - Terbangunnya Selasar Penghubung Dua Gedung	1 Paket 1 Unit	1 Dokumen	173,117,000	1 Gedung	5,996,387,750	1 Gedung	3,786,139,000	1 Dokumen 2 Gedung	9,955,643,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	0005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan dinas/operasional yang tersedia - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2 - Truk	1 unit 1 unit - -	10 Unit 10 Unit - -	3,237,670,000	2 Unit 1 Unit 7 Unit -	3,279,465,000	7 Unit 3 Unit 4 Unit 1 Unit	1,298,752,850	19 Unit 14 Unit 11 Unit 1 Unit	7,815,887,850	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			02 0013	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor yang tersedia	9 Jenis	58 Unit	330,614,500	57 Unit	867,411,000	16 Jenis	649,242,259	131 Jenis	1,847,267,759	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0014	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	14 Jenis	164 Unit	872,368,000	203 Unit	1,341,494,500	25 Unit	2,216,530,997	392 Jenis	4,430,393,497	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terjaganya kondisi fisik gedung kantor sehingga dapat berfungsi optimal	6 Paket	4 Paket	1,270,260,621	4 Paket	88,041,700	4 Paket	444,351,800	12 Paket	1,802,654,121	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara			172,927,760		146,928,652		241,002,938		560,859,350	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terjaganya kondisi fisik peralatan gedung kantor sehingga berfungsi optimal	7 Jenis	5 Jenis	91,726,000	5 Jenis	61,542,000	5 Jenis	217,624,150	5 Jenis	370,892,150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terjaganya kondisi fisik perlengkapan gedung kantor sehingga berfungsi optimal	4 Jenis	5 Jenis	28,793,013	5 Jenis	9,800,000	5 Jenis	95,700,000	5 Jenis	134,293,013	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	Luas Taman, Halaman Kantor, dan luas yang terlindungi kanopi yang terpelihara	3 Paket	4 Paket	151,595,550	1 Jenis	102,856,500	1 Jenis	650,519,000	4 Jenis	904,971,050	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0033	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi	- Jaringan Listrik yang Terpelihara - Jaringan Komunikasi yang Terpelihara	1 Jaringan			1 Jaringan	18,460,000	1 Jaringan	51,405,500	1 Jaringan	69,865,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
						1 Jaringan			1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			02	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Diperbaharunya kondisi fisik gedung kantor SKPD sehingga dapat tetap berfungsi secara normal	-	-	-	1 Dokumen DED	90,075,000	1 Paket	6,139,778,000	1 Paket	6,229,853,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Jaringan komputerisasi yang terpelihara	2 Paket	2 Jaringan	62,557,500	2 Jaringan	51,480,750	2 Jaringan	71,394,900	2 Jaringan	185,433,150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur SIPKD	Infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpelihara	-	1 Infrastruktur SIPKD	122,605,500	1 Infrastruktur	82,867,500	1 Infrastruktur	93,340,000	1 Infrastruktur	298,813,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
		3. Tenwujudnya Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur	-	-	57,306,600	-	137,800,000	-	207,270,000	-	402,376,600		
			03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia - Pakaian Batik yang tersedia - Pakaian Olah Raga yang tersedia	54 Stel	84 Potong 100 Potong 100 Stel	57,306,600	260 Potong	137,800,000	720 Potong	207,270,000	1064 Potong 100 Potong 100 Stel	402,376,600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Dinas yang tersedia	90 stel	-	-	-	-	-	-	0 Unit	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
		4. Tenwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	129,345,000	-	517,223,000	-	1,030,810,500	-	1,677,378,500		
			05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang dikirim - Jumlah Peserta yang mengikuti mindsetting	5 Orang 90 Orang	35 Orang	37,800,000	35 Orang 90 Orang	384,088,000	120 Orang	925,810,500	190 Orang	1,347,698,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			05 0005	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	- Jumlah Peserta dan Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan Rohani - Jumlah Peserta dan Frekuensi Pelaksanaan Olah Raga	90 Orang 49 Kali 90 Orang 42 Kali	100 Orang 49 Kali 100 Orang 42 Kali	91,545,000  1,416,209,400	100 Orang 29 Kali 100 Orang 31 Kali	133,135,000  1,409,405,650	100 Orang 36 Kali 100 Orang 46 Kali	105,000,000  1,606,430,273	100 Orang 114 Kali 100 Orang 119 Kali	329,680,000  4,432,045,323	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
	2. Terwujudnya pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD	Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan DPKBD	-	-	1,416,209,400	-	1,409,405,650	-	1,606,430,273	-	4,432,045,323		
			06 0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan DPKBD yang tersusun - LAKIP - LKPJ - LPPD/ILPPD - TAPKIN/JANKIN - RKT - UKP4	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	38,499,750	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	38,616,400	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	33,161,138	3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	110,277,288	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	57,371,900	1 Dokumen	38,501,800	1 Dokumen	44,023,200	3 Dokumen	139,896,900	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	106,167,000	1 Dokumen	61,305,500	1 Dokumen	55,797,950	3 Dokumen	223,270,450	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0005	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Dokumen Perencanaan Anggaran yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	195,598,150	5 Dokumen	166,409,300	2 Dokumen	178,561,775	12 Dokumen	540,569,225	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0006	Penatausahaan Keuangan SKPD	- Laporan Fungsional Bendahara yang Tersusun - LRA yang Tersusun	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	471,324,000	12 Dokumen 12 Dokumen	570,853,950	12 Dokumen 12 Dokumen	586,549,800	36 Dokumen 36 Dokumen	1,628,727,750	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2016)		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		TARGET	Rp.		
							REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.	REALISASI	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			06.0007	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Renja yang tersusun - Renstra yang tersusun	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	132,550,900	2 Dokumen	25,434,500	-	-	4 Dokumen 1 Dokumen	157,985,400	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	333,197,700	12 Dokumen	392,284,200	12 Dokumen	473,835,650	36 Dokumen	1,199,317,550	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0013	Publikasi Kinerja SKPD	Kinerja DPKBD yang terekspos di media massa	5 Materi	5 Materi	81,500,000	5 Materi	116,000,000	5 Materi	149,500,000	15 Materi	347,000,000	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0014	Penyusunan Renja SKPD	- Renja yang tersusun	-	-	-	-	-	2 Dokumen	32,076,900	2 Dokumen	32,076,900	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0015	Penyusunan Renstra SKPD	- Renstra yang tersusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	52,923,860	1 Dokumen	52,923,860	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong

Tabel 5.1.b. **Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Bogor Tahun 2017-2018**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Akuntabel di Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Keuangan Daerahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	-	76 PD	18,123,917,000	-	14,720,254,000	-	76,793,471,762		
		2. Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP			2. % Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah	-	-	69.44%	69.44%					
		3. % Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD			-	-	83.33%	83.33%						
		4. % Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan di Perangkat Daerah			-	-	83.33%	83.33%						
		5. % Penolakan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah			-	-	0.10%	0.10%						
		6. % Kelebihan Bayar Gaji dan Tunjangan PNS			-	-	0.43%	0.43%						
		7. % Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Tidak Lengkap Berdasarkan Per Undang-undangan			-	-	6.98%	6.98%						
		8. % Pencatatan Transaksi Keuangan yang Real Time di Perangkat Daerah			-	-	83.33%	83.33%						
		9. % Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah			-	-	83.33%	83.33%						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			17.0006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Rancangan Perda tentang APBD yang tersusun	6 Raperda	2 Raperda	910,780,000	2 Raperda	809,854,000	10 Raperda	4,372,824,600	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0007	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD yang tersusun	9 Raperbup	4 Raperbup	860,544,000	2 Raperbup	796,392,000	15 Raperbup	4,099,064,648	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang tersusun	3 Raperda	1 Raperda	906,072,000	1 Raperda	859,246,000	5 Raperda	4,227,768,600	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0009	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	3 Raperbup	1 Raperbup	706,012,000	1 Raperbup	639,285,000	5 Raperbup	3,031,032,300	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	3 Raperda	1 Raperda	697,562,000	1 Raperda	677,469,000	5 Raperda	3,298,667,625	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0011	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	3 Raperbup	1 Raperbup	504,909,000	1 Raperbup	484,909,000	5 Raperbup	2,323,699,020	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0014	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah	710 Orang	156 Orang	505,076,000	156 Orang	367,952,000	1022 Orang	1,544,090,910	Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0020	Penyusunan dan Pengadministrasian SPD	Surat Penyediaan Dana yang tersedia	1539 SPD	410 SPD	935,961,000	410 SPD	828,740,000	2359 SPD	4,257,565,850	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			17.0021	Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan	Dokumen Laporan Realsasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan yang tersusun	36 Dokumen	12 Dokumen	957,944,000	12 Dokumen	791,464,000	60 Dokumen	4,035,713,720	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0022	Verifikasi dan Penelitian RKA/DPA	PD yang RKA/DPA nya diverifikasi dan diteliti	78 SKPD	76 PD	807,085,000	72 PD	796,322,000	72 PD	4,258,580,490	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0023	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah yang tersusun	3 Dokumen	1 Dokumen	348,998,000	1 Dokumen	272,202,000	5 Dokumen	1,682,395,374	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0024	Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas	SP2D Belanja Langsung, Advis Belanja Langsung, Laporan Kas, dan Register Kas yang tersedia	12 Dokumen	4 Dokumen	978,794,000	4 Dokumen	881,361,000	20 Dokumen	4,694,978,775	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0025	Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai	- Daftar Gaji PNS, Laporan Rekapitulasi Gaji Induk Bulanan SKPP SP2D dan SSBP - Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Data Kepegawaian (SIMGAJI) dan Data Kepegawaian (SIMPEG) 36 PD, 40 Kecamatan, 42 UPT Puskesmas, 40 UPT Disdik, 60 SMP dan 46 SMA/SMK	18 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	894,850,000	6 Jenis Dokumen	817,058,000	30 Jenis Dokumen	4,220,427,150	Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0027	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan	Dokumen belanja bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga yang tersedia	9 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	928,924,000	3 Jenis Dokumen	819,599,000	15 Jenis Dokumen	4,444,989,250	Sub Bidang Perbendaharaan PPKD pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17.0038	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Dipelihara	1 Jaringan Sistem	1 Jaringan Sistem	144,000,000	1 Jaringan Sistem	144,000,000	1 Jaringan Sistem	742,060,000	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0050	Updating Data Pegawai	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Data Kepegawaian (SIMGAJI) dan Data Kepegawaian (SIMPEG)	78 SKPD	76 PD	629,600,000	72 PD	241,893,000	72 PD	2,494,891,450	Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			17.0051	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersusun	312 Dokumen	85 Dokumen	764,680,000	85 Dokumen	471,681,000	482 Dokumen	2,289,944,850	Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0066	Pengelolaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang tersusun	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	1,481,378,750	Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0067	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Dokumen Pembiayaan Daerah yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	119,949,000	Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17.0068	Penatausahaan dan Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah transaksi keuangan harian yang di jurnal	219939 Transaksi	120000 Transaksi	971,579,000	36000 Transaksi	665,591,000	375939 Transaksi	4,328,569,100	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0069	Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah PD yang didampingi dalam penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah	78 SKPD	76 PD	909,195,000	72 PD	812,017,000	72 PD	3,015,663,600	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0078	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah PD yang didampingi dalam penyusunan laporan keuangannya	78 SKPD	76 PD	408,985,000	72 PD	213,903,000	72 PD	1,917,339,600	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0102	Pengadministrasian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TP/TGR)	Data tuntutan ganti rugi daerah yang tersusun	36 Dokumen	1 Dokumen	271,046,000	1 Dokumen	196,088,000	38 Dokumen	1,214,408,450	Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17.0111	Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	- Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi - Rancangan Peraturan Bupati tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah - Sosialisasi Kebijakan SAP yang terbaru	1 Raperbup 1 Raperbup 156 Orang	- - -	- - -	- - -	- - -	1 Dokumen 1 Dokumen 156 Orang	483,743,200	Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			17 0115	Revisi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor	- Rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi yang tersusun - Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang tersusun	-	1 Raperbup	264,245,000	1 Raperbup	264,245,000	2 Raperbup	528,490,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0120	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/ Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD yang tersusun	3 Dokumen	1 Dokumen	324,120,000	1 Dokumen	224,988,000	5 Dokumen	1,266,717,850	Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17 0121	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/ Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah	Dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	133,611,000	1 Dokumen	88,011,000	4 Dokumen	626,987,600	Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan	Kec. Cibinong
			17 0122	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan	1 Sistem	1 Sistem	360,418,000	1 Sistem	243,720,000	1 Sistem	1,197,522,000	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi	Kec. Cibinong
			17 0123	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	78 SKPD	76 PD	272,642,000	72 PD	290,120,000	72 PD	863,785,000	Sub Bidang Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0124	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi SIPKD	1061 Orang	312 Orang	438,000,000	312 Orang	392,469,000	1685 Orang	1,812,263,000	Sub Bidang Teknologi Informasi pada Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi	Kec. Cibinong
			17 0130	Pengelolaan Anggaran PPKD	Dokumen Pengelolaan Anggaran PPKD yang tersedia	-	1 Dokumen	434,565,000	1 Dokumen	360,266,000	2 Dokumen	794,831,000	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17 0131	Penyusunan Perencanaan Pembiayaan	Dokumen Perencanaan Pembiayaan Daerah yang tersusun	-	1 Dokumen	330,720,000	1 Dokumen	269,409,000	2 Dokumen	600,129,000	Sub Bidang Anggaran PPKD pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong
			17 0151	Penyusunan Anggaran Berbasis SIMPEL	Jumlah Peserta Pengenalan Penyusunan Anggaran Berbasis SIMPEL	-	320 Orang	523,000,000	-	-	320 Orang	523,000,000	Sub Bidang Anggaran Belanja pada Bidang Anggaran	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Daerah	Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik	18	Program Pengelolaan Barang Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Keuangan Daerahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 2. % Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD 3. % Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah 4. % Pemanfaatan BMD yang tidak Digunakan di Perangkat Daerah 5. % Peningkatan Pengamanan Administrasi BMD yang Memiliki Bukti Kepemilikan	-	76 PD	4,585,667,000	-	4,425,552,000	-	21,400,619,072		
			18.0001	Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan	Laporan Hasil Pengadaan Belanja Modal dan Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun	6 Dokumen	2 Dokumen	344,920,000	2 Dokumen	276,407,000	10 Dokumen	1,567,569,799	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0002	Penyusunan Buku Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa	Rancangan Perbup tentang Standar Harga Tertinggi Barang/Jasa yang tersusun	6 Raperbup	2 Raperbup	369,019,000	2 Raperbup	328,526,000	10 Raperbup	1,508,417,965	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) yang tersusun	12 Dokumen	4 Dokumen	382,649,000	4 Dokumen	338,385,000	20 Dokumen	1,220,581,409	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0005	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rancangan SK Bupati tentang Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) yang tersusun	12 Rakepbup	-	-	4 Rakepbup	125,000,000	16 Rakepbup	668,873,074	Sub Bidang Perencanaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			18.0007	Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Monitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	203,255,000	1 Dokumen	198,379,000	5 Dokumen	904,445,675	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0011	Pemutahiran Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Dokumen	1 Dokumen	487,125,000	-	-	4 Dokumen	1,809,018,220	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0015	Penerbitan Alas Hak Tanah	Dokumen Alas Hak Tanah yang terbit	300 Berkas	100 Berkas	359,600,000	100 Berkas	272,600,000	500 Berkas	1,616,818,550	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0016	Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor	Rancangan SK Bupati tentang Penghapusan Aset Daerah	60 Rakepbup	20 Rakepbup	385,149,000	20 Rakepbup	290,977,000	100 Rakepbup	1,962,795,660	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0017	Pendayagunaan Barang Pemerintah Kabupaten Bogor	Rancangan SK Bupati yang tersusun	133 Rakepbup	30 Rakepbup	643,850,000	25 Rakepbup	356,100,000	188 Rakepbup	1,971,392,200	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0018	Pengamanan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bogor	Jumlah Bangunan dan Bidang tanah yang diamankan	300 Bidang Tanah	100 Bidang Tanah	459,720,000	100 Bidang Tanah	399,619,000	500 Bidang Tanah	2,039,785,150	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0019	Pengembalian Batas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor	Dokumen status pengembalian batas tanah yang tersedia	45 GS	15 GS	239,167,000	15 GS	213,403,000	75 GS	1,766,013,500	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0020	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah	78 SKPD	76 PD	219,390,000	72 PD	214,880,000	72 PD	1,195,879,550	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18.0030	Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor	Modul Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dikembangkan	15 Kecamatan 6 Modul Pengembangan ATISISBADA	2 Modul Pengembangan ATISISBADA	287,242,000	2 Modul Pengembangan ATISISBADA	258,203,000	15 Kecamatan 10 Modul Pengembangan ATISISBADA	1,811,374,320	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
							2017		2018		TARGET	Rp.			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			18	0032	Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah	-	152 Orang	74,105,000	-	-	152 Orang	74,105,000	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18	0033	Legalisasi Ijin Bangunan/Gedung Milik Daerah	Bangunan PD yang memiliki IMB	-	4 Gedung Pemerintah	130,476,000	4 Gedung Pemerintah	126,477,000	8 Gedung Pemerintah	256,953,000	Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
			18	0045	Sensus Barang Daerah	Buku Induk Inventaris Barang Daerah	-	-	-	1 Dokumen	1,026,596,000	1 Dokumen	1,026,596,000	Sub Bidang Penatausahaan pada Bidang Aset Daerah	Kec. Cibinong
	3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan BPKAD	1. % Aset dalam Kondisi Baik 2. Nilai AKIP BPKAD 3. Temuan Materil	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	4,558,496,000	16 Kegiatan	3,546,136,000	15 Kegiatan	16,808,964,225		
			01	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai yang Tersedia - Materai 6000 - Materai 3000	800 Lembar 800 Lembar	- -	- -	- -	- -	800 Lembar 800 Lembar	6,240,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang Dibayarkan: - Telepon - Internet - Listrik - Air - Transaksi Perbankan	5 Jaringan 4 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	3 Jaringan 3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	- - - - -	3 Jaringan 3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	766,632,000	3 Jaringan 3 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan	3,381,959,735	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayar Pajaknya : - Roda 4 - Roda 2	65 Unit 125 Unit	22 Unit 34 Unit	- -	22 Unit 34 Unit	36,200,000	109 Unit 193 Unit	154,020,400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01	0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Luas area yang dibersihkan - Jumlah Petugas Kebersihan yang Dibiayai - Jenis Alat Kebersihan Kantor yang Tersedia	2945 m2 8 Orang	2945 m2 12 Orang	355,715,000	2945 m2 8 Orang	328,480,000	2945 m2 8 Orang	1,403,779,650	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			01 0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	30 Jenis	32 Jenis	164,544,000	30 Jenis	64,647,000	32 Jenis	613,652,635	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia : - Cetakan - Penggandaan	175000 Jenis 175000 Lembar	17 Jenis 50000 Lembar	140,994,000	19 Jenis 50000 Lembar	60,011,000	19 Jenis 275000 Lembar	570,295,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen instalasi listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	14 Jenis	14 Jenis	88,885,000	14 Jenis	45,563,000	14 Jenis	317,593,050	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	- Berlangganan Surat Kabar - Buku Peraturan Perundang-Undangan	114 Eksemplar 6 Jenis	51 Eksemplar 22 Jenis	98,544,000	39 Eksemplar 10 Jenis	72,600,000	204 Eksemplar 22 Jenis	443,895,765	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia - Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	9 Tabung	9 Tabung	48,534,000	9 Tabung	12,011,000	9 Tabung	76,394,445	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Frekuensi Pemberian Jamu Makanan dan Minuman	431 Kali	132 Kali	226,000,000	158 Kali	227,357,000	721 Kali	1,074,052,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah	181 orang/hari 181 orang/hari	95 orang/hari 50 orang/hari	507,120,000	58 orang/hari 30 orang/hari	438,520,000	334 orang/hari 261 orang/hari	1,651,022,122	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran yang Dibayar : - Tenaga Kontrak	5 Orang	2 Orang	71,310,000	2 Orang	70,381,000	2 Orang	286,260,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			01 0020	Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jenis Dokumen dan Arsip yang Ditata	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	849,463,000	4 Jenis Dokumen	551,049,000	4 Jenis Dokumen	3,002,885,550	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0022	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jenis Dokumen Administrasi Barang	5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	36,905,000	5 Jenis Dokumen	29,630,000	5 Jenis Dokumen	117,190,050	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0024	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	-	-	-	15 Orang	319,767,000	15 Orang	319,767,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0040	Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Dikelola (DUK, KGB, Pensiun, KNP dan Mutasi)	5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	598,969,000	5 Jenis Dokumen	523,288,000	5 Jenis Dokumen	2,110,376,323	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			01 0043	Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Petugas Keamanan Kantor	12 Orang	15 Orang	441,831,000	-	-	15 Orang	1,279,579,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	13 Kegiatan	14 Kegiatan	5,274,804,000	12 Kegiatan	1,317,519,000	14 Kegiatan	41,199,150,190		
			02 0003	Pembangunan Gedung Kantor	- Tersusunnya DED - Terbangunnya Gedung - Terbangunnya Selasar - Penghubung Dua Gedung	1 Dokumen 2 Gedung 1 Unit	- - -	- - -	- - -	- - -	1 Dokumen 2 Gedung 1 Unit	9,955,643,750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02 0005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang tersedia		2 Unit	1,651,760,000	2 Unit	226,450,000	29 Unit	9,694,097,850	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
					- kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2	14 Unit 11 Unit	1 Unit 1 Unit		1 Unit 1 Unit		16 Unit 13 Unit			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			02.0013	Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis Peralatan kantor yang tersedia	131 Jenis	3 Jenis	280,180,000	6 Jenis	131,833,000	140 Jenis	2,259,280,759	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02.0014	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan kantor yang tersedia	392 Jenis	5 Jenis	1,413,621,000	7 Jenis	108,250,000	404 Jenis	5,952,264,497	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02.0021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	12 Paket	2 Gedung	396,275,000	2 Gedung	162,300,000	12 Paket 2 Gedung	2,361,229,121	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02.0023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara			348,100,000		240,000,000		1,148,959,350	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
					- kendaraan roda 4	13 Unit	23 Unit		13 Unit		13 Unit			
					- kendaraan roda 2	25 Unit	34 Unit		25 Unit		25 Unit			
			02.0029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	5 Jenis	5 Jenis	249,180,000	5 Jenis	177,536,000	5 Jenis	797,608,150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02.0030	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	5 Jenis	4 Jenis	53,500,000	5 Jenis	45,000,000	5 Jenis	232,793,013	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02.0031	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	Luas Taman dan Halaman Kantor yang Terpelihara	4 Jenis	1 Halaman	432,539,000	1 Halaman	52,125,000	1 Halaman	1,389,635,050	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02.0033	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi	Jumlah Jaringan Listrik dan Komunikasi yang Terpelihara :			46,634,000		15,875,000		132,374,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
					- Jaringan Listrik	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan			
					- Jaringan Komunikasi	1 Jaringan	1 Jaringan		1 Jaringan		1 Jaringan			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
							2017		2018		TARGET	Rp.			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			02	0037	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Diperbaruinya kondisi fisik gedung kantor PD sehingga dapat tetap berfungsi secara normal 1 Dokumen DED 1 Paket	- -	-	-	-	1 Dokumen DED 1 Paket	6,229,853,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong	
			02	0038	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi	Jumlah Jaringan Komputerisasi yang Terpelihara	2 Jaringan	2 Jaringan Komputer	53,000,000	2 Jaringan Komputer	51,150,000	2 Jaringan Komputer	289,583,150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	0040	Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur SIPKD	Jumlah Infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terpelihara	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	126,815,000	1 Infrastruktur	76,125,000	1 Infrastruktur	501,753,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	0802	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Barang Milik Daerah	Jumlah Gudang Barang Milik Daerah yang Terpelihara	-	2 Gudang	25,875,000	2 Gudang	30,875,000	1 Paket	56,750,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			02	0803	Rehabilitasi Ringan Gudang Barang Milik Daerah	Jumlah Rak Gudang Barang Milik Daerah yang terpasang	-	1 Gudang	197,325,000	-	-	1 Gudang	197,325,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Kegiatan	2 Kegiatan	164,525,000	-	-	2 Kegiatan	566,901,600		
			03	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan - Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia - Pakaian Batik yang tersedia - Pakaian Olah Raga yang tersedia	1064 Stel 100 Potong 100 Stel	84 Stel 130 Potong 130 Stel	164,525,000	-	-	1148 Stel 230 Potong 230 Stel	566,901,600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Sumber Daya yang Berkualitas	2 Kegiatan	3 Kegiatan	322,652,000	3 Kegiatan	265,071,000	3 Kegiatan	2,265,101,500		
			05	0001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	190 Orang	130 Orang	200,652,000	35 Orang	118,071,000	355 Orang	1,666,421,500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			05 0005	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga dan Pengajian - Jumlah Peserta dan Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan Rohani - Jumlah Peserta dan Frekuensi Pelaksanaan Olah Raga	100 Orang 147 Kali  100 Orang 119 Kali	100 Orang 49 Kali  100 Orang 42 Kali	122,000,000		147,000,000		598,680,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan PD	9 Kegiatan	9 Kegiatan	1,989,621,000		1,538,515,000		7,960,181,323		
			06 0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD yang tersusun - LAKIP - LKPJ - LPPD/ILPPD - TAPKIN/JANKIN - RKT - UKP4	3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	58,376,000		41,860,000		210,513,288	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran PD yang Tersusun	3 Dokumen	1 Dokumen	48,881,000		39,259,000		228,036,900	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD yang Tersusun	3 Dokumen	1 Dokumen	65,956,000		41,003,000		330,229,450	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0005	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran yang Tersusun	12 Dokumen	5 Dokumen	255,279,000		191,596,000		987,444,225	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06 0007	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Renja yang tersusun - Renstra yang tersusun	4 Dokumen 1 Dokumen	- -	- -		- -		157,985,400		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)		UNIT KERJA PD PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							2017		2018		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			06.0006	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan : - Laporan Fungsional Bendahara - LRA	36 Dokumen 36 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	689,512,000		582,140,000		2,900,379,750	Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan PD	36 Dokumen	12 Dokumen	609,332,000	12 Dokumen	455,091,000	60 Dokumen	2,263,740,550	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0013	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Bahan Publikasi yang Terselenggara	15 Materi	4 Materi	150,000,000	5 Materi	150,000,000	24 Materi	647,000,000	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0014	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja PD yang Tersusun	6 Dokumen	2 Dokumen	56,695,000	2 Dokumen	37,566,000	10 Dokumen	126,337,900	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong
			06.0015	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra PD yang Tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	55,590,000	-	-	3 Dokumen	108,513,860	Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat	Kec. Cibinong

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, untuk itu BPKAD Kabupaten Bogor berupaya berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

Misi Kabupaten Bogor yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi yang ke-lima yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran tersebut, strategi yang diterapkan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dengan arah kebijakan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah. Pencapaian misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tersebut diukur melalui indikator "Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dengan target opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam rangka memenuhi pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Pendekatan kinerja maksudnya adalah program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh karenanya dilakukan perbaikan pada indikator target kinerja dengan tujuan agar lebih terukur, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

Tabel 6.1.a. **Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2014-2016 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	
1.	Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD/Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD
2.	Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD/Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP)	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD	100,00% 78 SKPD

Tabel 6.1.b. **Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2017-2018 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan).

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 dan Perubahan Renja Tahun 2017, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra.

Pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

  
**H. DIDI KURNIA, SH., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
NIP. 196010111985031001

